

LAPORAN KINERJA (LAKIN) TAHUN 2017 KOPERTIS WILAYAH III



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH III
TAHUN 2017

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR GRAFIK	v
KATA PENGANTAR	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	4
C. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi	6
D. Permasalahan Utama yang dihadapi organisasi	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
B. Realisasi Anggaran	50
BAB IV PENUTUP	52
LAMPIRAN:	
Perjanjian Kinerja Tahun 2017	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah PTS per Wilayah (DKI Jakarta).	2
Tabel 2.	Jumlah PTS per Wilayah (Depok, Bogor, Bekasi, dan Tangerang).	3
Tabel 3.	Jumlah Tenaga Administrasi.	3
Tabel 4.	Sebaran Dosen PNS Ditugaskan di PTS.	3
Tabel 5.	Perjanjian Kinerja (PK) Kopertis Wilayah III Tahun 2017.	15
Tabel 6.	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017.	16
Tabel 7.	Capaian Sasaran Strategis 1 Tahun 2017.	18
Tabel 8.	Capaian Sasaran Strategis 2 Tahun 2017.	25
Tabel 9.	Capaian Sasaran Strategis 3 Tahun 2017.	46
Tabel 10.	Realisasi Anggaran Tahun 2017 Berdasarkan Program.	51
Tabel 11.	Realisasi Anggaran Tahun 2017 Berdasarkan Jenis Belanja.	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Kopertis Tipe A.	7
Gambar 2.	Tampilan laman Kopertis Wilayah III sesudah dilakukan pengembangan	19
Gambar 3.	Tampilan Sistem Informasi dan Dokumentasi Kelembagaan (SIDIK).	20
Gambar 4.	Narasumber Menjelaskan Materi kinerja dosen PNS yang ditugaskan pada PTS di lingkungan Kopertis Wilayah III.	22
Gambar 5.	Pegawai sedang mengikuti pelatihan kompetensi non gelar.	23
Gambar 6.	Narasumber Menjelaskan Materi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Kepada Peserta Semiloka.	28
Gambar 7.	Narasumber Memberikan Paparan Mengenai Aplikasi Sertifikasi Dosen Kepada Peserta Sosialisasi.	32
Gambar 8.	Peserta Melakukan Diskusi Kelompok Sistem Penjaminan Mutu Internal.	34
Gambar 9.	Sosialisasi Peraturan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.	49

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Perkembangan PTS di lingkungan Kopertis Wilayah III.	2
Grafik 2.	Perkembangan Daya Serap Keuangan Kopertis Wilayah III	21
Grafik 3.	Akreditasi Institusi PTS di lingkungan Kopertis Wilayah III	27
Grafik 4.	Rekomendasi Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia	29
Grafik 5.	Kualifikasi Akademi Dosen di lingkungan Kopertis Wilayah III.	30
Grafik 6.	Hasil Sertifikasi Dosen	32
Grafik 7.	Akreditasi Program Studi.	34
Grafik 8.	Realisasi Penerima Beasiswa Bidikmisi.	38
Grafik 9.	Dosen yang mendapat Jabatan Akademik Profesor.	41
Grafik 10.	Hasil Penilaian Angka Kredit Di Kopertis Wilayah III.	42

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja (LAKIN) Kopertis Wilayah III tahun 2017 dapat diselesaikan dengan baik. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Sesuai dengan tuntutan adanya transparansi dan akuntabilitas kinerja maka penyusunan LAKIN Kopertis Wilayah III dapat dimaknai sebagai informasi publik yang formal dalam mempertanggungjawabkan implementasi dengan tepat, jelas dan legitimate, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna dan bertanggung jawab bagi keseluruhan program kerja selama satu tahun berjalan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Kopertis Wilayah III tahun 2017 merupakan bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh, yaitu sebagai wujud prasyarat terselenggaranya *good governance* yang merupakan keharusan bagi setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan unit organisasi yang berakuntabilitas kinerja baik dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerjanya kepada seluruh stakeholders termasuk Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Selain itu, laporan ini menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kopertis Wilayah III, karena memuat capaian kinerja yang memenuhi maupun yang belum memenuhi sasaran. Capaian kinerja ini akan dianalisis lebih lanjut bagi tujuan identifikasi peluang perbaikan kinerja yang dapat dilakukan pada tahun-tahun berikutnya. Secara garis besar LAKIN tahun 2017 Kopertis Wilayah III menyajikan target dan capaian kinerja Kopertis Wilayah III pada tahun 2017 berdasarkan rencana kinerja tahun 2017.

Melalui kerja keras serta dukungan dari seluruh unit di lingkungan Kopertis Wilayah III telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dengan baik. Gambaran mengenai hasil kinerja akan dimanfaatkan oleh stakeholders sebagai media pertanggungjawaban kinerja serta upaya peningkatan kinerja bagi Kopertis Wilayah III. Semoga LAKIN Kopertis Wilayah III

tahun 2017 ini dapat memberikan suatu informasi dan pertanggungjawaban secara komprehensif, faktual, dan aktual.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini, yang telah memberikan kontribusi bagi penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kinerja di lingkungan Kopertis Wilayah III, baik dalam bentuk pemikiran, tenaga, penyiapan data dan informasi maupun sumbangsih lainnya, kami ucapkan terima kasih semoga sumbangsihnya mendapatkan ganjaran pahala yang setimpal dari Allah S.W.T Aamiin Y.R.A.

Jakarta, Januari 2018

Koordinator

Illah Sailah

NIP 195805211982112001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIP) Kopertis Wilayah III tahun 2017 disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015-2019 yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2017. Kemudian LAKN dirumuskan secara terencana dan sistematis dilengkapi dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi yang diuraikan dalam kebijakan, program dan kegiatan, sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi dan kebijakan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti). Rujukan yang digunakan yaitu Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dan dilaksanakan kemudian dilakukan analisis capaian sasaran strategis yang berkaitan dengan Penetapan Kinerja, sebagai berikut:

1. Meningkatnya sistem dan kualitas/kuantitas sumber daya.

Dari 3 (tiga) indikator kinerja yang ada untuk mengukur sasaran strategis, seluruh indikator kinerja telah mencapai target bahkan melebihi.

2. Meningkatnya relevansi, kuantitas dan kualitas pendidikan tinggi.

Dari 14 (empat belas) indikator kinerja yang ada untuk mengukur sasaran, ada 1 (satu) indikator kinerja yang belum mencapai target dengan prosentase capaian dibawah 70%, ada 6 (enam) indikator kinerja yang mencapai target dengan prosentase capaian antara 70% sampai dengan 100%, sedangkan 7 (tujuh) indikator kinerja yang melebihi dari target.

3. Terlaksananya kerjasama PTS dengan pihak internasional dalam bidang tridharma perguruan tinggi.

Dari 3 (tiga) indikator kinerja yang ada untuk mengukur sasaran, seluruh indikator kinerja telah mencapai target bahkan melebihi.

Seluruh sasaran strategis, dapat direalisasikan dengan dukungan anggaran biaya yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-042.01.2.400894/2017 dan Nomor SP DIPA- 042.03.2.401228/2017 tanggal 7 Desember

2016 beserta revisinya, dengan total anggaran sebesar Rp. 315.385.531.000 telah terealisasi sebesar Rp. 312.003.275.394 (98,93%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 3.382.255.606 (1,07%).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

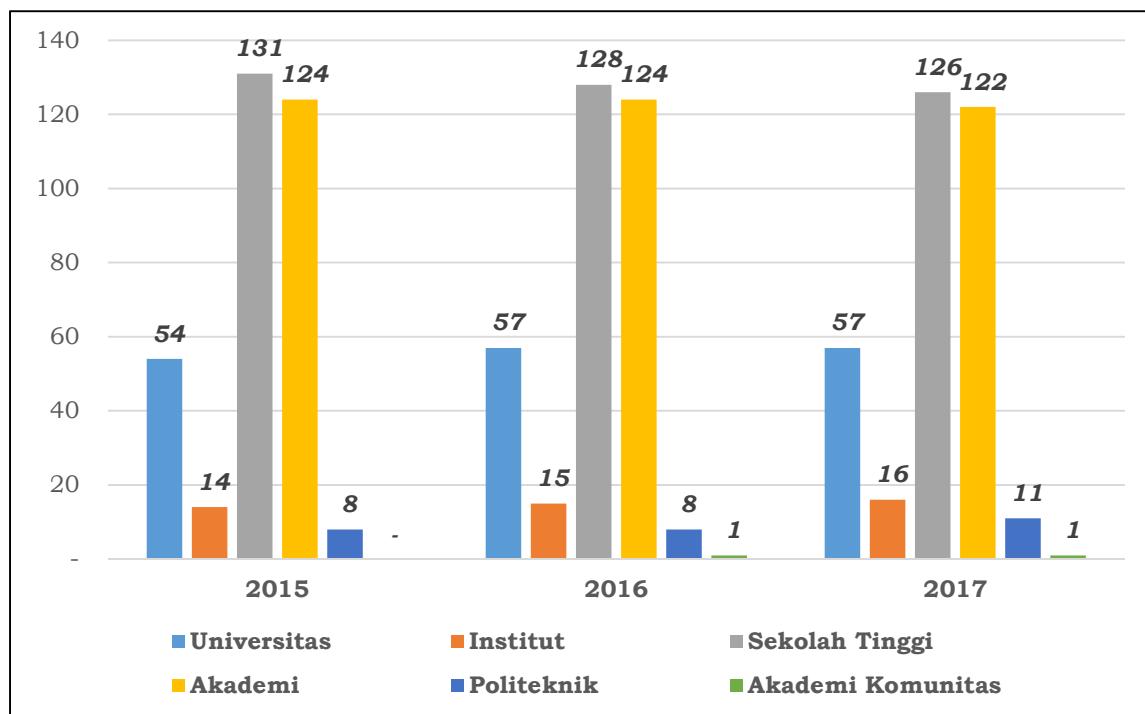
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 tahun 2013. Kewenangan Kopertis sangat terbatas sebagai pelaksana tugas yang membantu mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi swasta. Jadi, Kopertis merupakan perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di setiap wilayah, tetapi bukan merupakan instansi vertikal.

Mengacu pada Pasal 57 Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyebutkan: (1) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi merupakan satuan kerja Pemerintah di wilayah yang berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi; (2) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Menteri; Menteri menetapkan tugas dan fungsi lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan; (4) Menteri secara berkala mengevaluasi kinerja lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kemudian Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Kopertis) bertanggungjawab kepada Menteri, dan pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Kerangka kelembagaan Kopertis saat ini belum sesuai dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 yaitu menjadi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, namun dengan kerangka kelembagaan yang ada berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 tahun 2015 Kopertis masih mampu melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu melaksanakan Pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Masa transisi ini menjadi penting bagi Kopertis untuk mempersiapkan diri menuju Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, terutama dalam konteks perubahan pola pikir, penyediaan sumber daya, dan pemahaman tugas dan fungsi baru.

Saat ini, Kopertis Wilayah III dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan PTS di wilayah Jakarta dan wilayah pengembangannya. Sampai dengan akhir tahun 2017 terdapat 333 PTS yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.



Grafik 1. Perkembangan PTS di lingkungan Kopertis Wilayah III.

Tabel 1. Jumlah PTS per Wilayah (DKI Jakarta).

No.	Bentuk PTS	Jumlah PTS					Total
		Jakarta Pusat	Jakarta Timur	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Utara	
1.	Universitas	5	17	10	18	2	52
2.	Institut	2	5	2	5	2	16
3.	Sekolah Tinggi	22	36	11	47	3	119
4.	Akademi	22	49	8	28	9	116
5.	Politeknik	2	1	1	5	1	10

6.	Akademi Komunitas	-	-	-	1	-	1
Jumlah		53	108	32	104	17	314

Tabel 2. Jumlah PTS per Wilayah (Depok, Bogor, Bekasi, dan Tangerang).

No.	Bentuk PTS	Jumlah PTS				Total
		Depok	Bogor	Bekasi	Tangerang	
1.	Universitas	1	-	-	4	5
2.	Institut	-	-	-	-	-
3.	Sekolah Tinggi	1	1	3	3	8
4.	Akademi	2	-	2	1	5
5.	Politeknik	-	-	-	1	1
6.	Akademi Komunitas	-	-	-	-	-
Jumlah		4	1	5	9	19

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Kopertis Wilayah III didukung dengan sumber daya manusia tenaga administrasi sebanyak 71 orang dan tenaga dosen PNS yang ditugaskan pada PTS di lingkungan Kopertis Wilayah III sebanyak 696 orang. Rincian data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Jumlah Tenaga Administrasi.

Golongan				Total
I	II	III	IV	
-	11	47	11	71

Tabel 4. Sebaran Dosen PNS Ditugaskan di PTS.

No.	Bentuk PTS	Jumlah
1.	Universitas	493
2.	Institut	51
3.	Sekolah Tinggi	129
4.	Akademi	20

5.	Politeknik	3
6.	Akademi Komunitas	-
Jumlah		696

Selanjutnya upaya mengoptimalkan pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Kopertis Wilayah III telah menerapkan perubahan kinerja secara komprehensif diantaranya melalui penerapan tata nilai kinerja sebagai bentuk peningkatan budaya organisasi dengan konsep dasar “melayani dengan hati” yang kemudian diimplementasikan melalui pemaknaan:

K = Komitmen pada mutu

O = Orientasi pada proses dan hasil

P = Prima dalam melayani

E = Empati pada pemangku kepentingan

R = Reflektif dalam bekerja

T = Terbuka terhadap masukan

I = Integritas sebagai landasan kerja

S = Santun dan memberi solusi

B. Dasar Hukum

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis Wilayah III), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2016 disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1452);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1116);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 305/M/KP/IX/2015 tanggal 3 September 2015 tentang Pengangkatan Koordinator Kopertis Wilayah III.

C. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Saat ini tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta masih mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta, maka Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta mempunyai tugas dan fungsi serta struktur organisasi sebagai berikut:

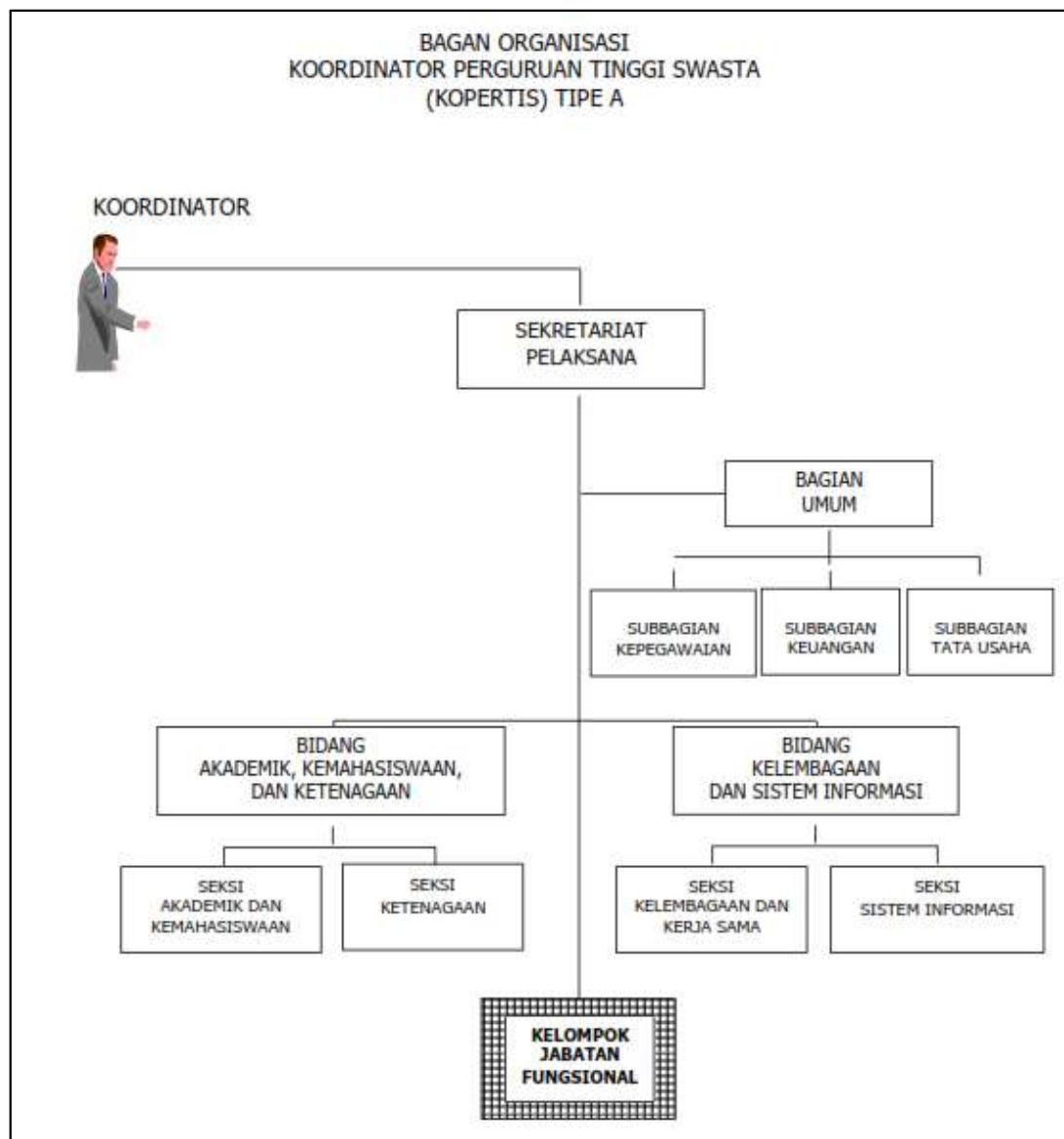
1. Tugas Pokok.

Merumuskan kebijakan dan melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

2. Fungsi.

- a. merumuskan kebijakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan Direktur Jenderal;
- b. melaksanakan koordinasi dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya;
- c. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat pada perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya dan wilayah pengembangannya;
- d. melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan ketenagaan perguruan tinggi swasta;
- e. melaksanakan kerja sama dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya; dan
- f. melaksanakan dan koordinasi pengembangan perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya.

3. Struktur Organisasi



Gambar 1. Struktur Organisasi Kopertis Tipe A.

D. Permasalahan Utama yang dihadapi organisasi

Permasalahan utama yang dihadapi Kopertis Wilayah III dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi swasta guna mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan menghasilkan iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa adalah sebagai berikut:

1. Kondisi Internal

Secara internal permasalahan yang dihadapi Kopertis Wilayah III sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan kepada PTS sampai dengan tahun 2017 adalah:

1. Tata kelola manajemen yang berbasis teknologi informasi masih belum terpenuhi sehingga proses pelayanan masih membutuhkan waktu yang cukup lama dalam penyelesaiannya.
2. Sarana kantor Kopertis kurang memadai karena berdiri sejak tahun 1983 dan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan saat ini.
3. Prasarana kantor khususnya ruang rapat/pertemuan dan tempat parkir kendaraan sangat kurang memadai bila ditinjau dari jumlah pelayanan yang dilaksanakan Kopertis Wilayah III untuk melayani 333 PTS.
4. Jumlah SDM khususnya tenaga kependidikan yang berjumlah 71 orang dengan standar kompetensi yang belum sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan dalam melaksanakan pelayanan.

2. Kondisi Eksternal

Permasalahan eksternal untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PTS dapat disampaikan hal hal sebagai berikut:

1. Kualitas SDM:
 1. Dosen dengan kualifikasi pendidikan S3 (Doktor) baru mencapai 13%.
 2. Dosen yang belum memiliki jabatan fungsional sebesar 45%.
 3. Banyak program studi yang tidak memenuhi persyaratan rasio dosen tetap terhadap mahasiswa.
2. Kualitas Kelembagaan:
 1. PTS yang terakreditasi A (unggul) baru berjumlah 12 PTS atau 3,6% dari 333 PTS.
 2. Program studi yang terakreditasi minimal B baru mencapai 60%.

3. Belum terlaksananya pendataan program studi yang telah memiliki akreditasi/sertifikat internasional.
 4. Belum terlaksananya pendataan mahasiswa asing.
3. Kualitas Kegiatan Kemahasiswaan:
1. Belum terlaksananya pendataan prestasi mahasiswa didapat pada tingkat nasional dan internasional baik dalam kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh Kemenristekdikti maupun non-kemenristekdikti.
 2. Peran serta PTS dalam mengembangkan kegiatan kemahasiswaan.
4. Kualitas Penelitian dan Publikasi Ilmiah:
1. Belum terlaksana pendataan kinerja penelitian.
 2. Rasio jumlah publikasi yang terindeks terhadap jumlah dosen belum dapat diukur secara valid dan dapat dipertanggung jawabkan.
 3. Belum terlaksana pendataan kinerja pengabdian pada masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Undang Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012, kehadiran dan peran Kopertis ke depan dirasakan sangat signifikan dalam menunjang pencapaian visi dan misi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) mengingat dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, globalisasi, dan semakin bergesernya perekonomian dunia pada ekonomi berbasis pengetahuan, maka pendidikan tinggi swasta (PTS) semakin dibutuhkan oleh masyarakat luas maupun negara. Pendidikan tinggi di Indonesia dalam beberapa dasawarsa terahir terus tumbuh dengan cukup signifikan. Kemajuan pembangunan membutuhkan kualifikasi tenaga kerja yang semakin tinggi sehingga kebutuhan akan pendidikan tinggi terus meningkat. Di sisi lain, perguruan tinggi dipandang sebagai salah satu sumber inovasi dan solusi bagi kemajuan bangsa baik melalui temuan di bidang industri, pertanian, kesehatan, infrastruktur, maupun sosial-ekonomi secara luas. Pada saat yang sama, globalisasi mendorong setiap negara untuk semakin kompetitif dalam merebut pasar dunia dan mempertahankan pertumbuhan ekonominya. Kesejahteraan masyarakat tak lagi ditentukan oleh kekayaan sumberdaya alam maupun ketersediaan tenaga kerja, tetapi lebih ditentukan oleh kualitas manusia, oleh daya saing dan produktivitas warga masyarakatnya. Oleh karenanya peran pendidikan tinggi menjadi sangat sentral dalam membangun daya saing bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks tersebut maka PTS diharapkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi kemajuan bangsa dengan menghasilkan lulusan yang berkarakter, cerdas, dan terampil; memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni baik melalui adaptasi kemajuan ipteks untuk kemakmuran bangsa, maupun melalui penciptaan inovasi yang relevan bagi pembangunan.

Dengan pertimbangan menjalankan mandat Undang Undang Dasar 1945, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan menyelaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) Kemristekdikti serta mempertimbangkan kerangka kerja logis yang dibangun untuk menopang daya saing nasional dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh Kopertis

Wilayah III, maka Kopertis Wilayah III menyusun visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Visi.

Visi yang ditetapkan Kopertis Wilayah III dalam mendukung visi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, ditetapkan sebagai berikut:

“Menjadi Unit Kerja yang menyelenggarakan layanan prima untuk mewujudkan PTS yang sehat dan bermutu”

Layanan prima yang dimaksud adalah kemampuan Kopertis melayani dengan cepat tepat dan sesuai peraturan yang berlaku dengan didukung oleh sumberdaya manusia yang handal serta fasilitas pendukung pelayanan yang memadai. Sedangkan makna mewujudkan PTS sehat dan bermutu adalah implementasi dari tugas dan fungsi Kopertis yaitu melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan kepada PTS dengan harapan PTS dapat melaksanakan fungsinya sesuai dengan aturan dan mampu menghasilkan lulusan berdaya saing global dan IPTEK yang bermanfaat bagi masyarakat.

2. Misi.

Sebagai upaya mewujudkan Visi tersebut diatas, maka Misi Kopertis Wilayah III adalah:

1. Menguatkan sistem layanan daring dan peningkatan sumber daya;
2. Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi;
3. Memfasilitasi jejaring kerja PTS dengan masyarakat internasional.

Misi ini mencakup upaya menjawab permasalahan yang dihadapi Kopertis Wilayah III Jakarta periode tahun 2015-2019

3. Tujuan Strategis.

Visi dan misi Kopertis Wilayah III yang telah dirumuskan perlu dijabarkan dalam bentuk tujuan strategis yang selaras dengan perkembangan teknologi dan informasi. Tujuan strategis yang akan dicapai:

1. Terbangunnya sistem berbasis elektronik dan sumber daya yang memadai;
2. Terwujudnya PTS yang sehat dan bermutu;

3. Terciptanya kerjasama antar PTS dengan masyarakat di tingkat internasional yang saling menguntungkan.
4. Sasaran Strategis.

Tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam 3 (tiga) sasaran strategis sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan dalam kurun waktu 2015-2019. Sasaran strategis tersebut adalah:

1. Meningkatnya sistem dan kualitas/kuantitas sumber daya;
2. Meningkatnya relevansi, kuantitas dan kualitas pendidikan tinggi;
3. Terlaksananya kerjasama PTS dengan pihak internasional dalam bidang tridharma perguruan tinggi.

Untuk melihat secara lebih konkret ketercapaian sasaran strategis tersebut perlu ditetapkan ukuran indikator kinerja tersebut secara kuantitatif. Dalam rancangan 5 (lima) tahun ke depan, indikator kinerja sasaran strategis diukur (1) indeks reformasi birokrasi Kopertis ditargetkan mencapai nilai 90 (sembilan puluh), (2) jumlah PTS masuk 100 TOP Nasional sebanyak 22 PTS dan (3) jumlah PTS melakukan kerjasama dengan masyarakat internasional dalam bidang tridharma perguruan tinggi sebanyak 180.

5. Arah Kebijakan dan Strategi.

Arah kebijakan Kopertis Wilayah III mengacu dengan arah kebijakan dan strategi Kemristekdikti yang telah mengalami penyelarasan dan diterbitkan melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 tahun 2017.

Kopertis merupakan perpanjangan tangan Kemristekdikti melalui implementasi regulasi yang telah diterbitkan oleh Kementerian. Arah kebijakan yang sangat terkait dengan arah kebijakan Kementerian diantaranya yaitu peningkatan tenaga terdidik dan terampil, peningkatan kualitas pendidikan tinggi, peningkatan sumberdaya pendidikan tinggi, dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta memiliki pelayanan publik secara berkualitas.

Arah kebijakan Kopertis harus dapat mendorong PTS dalam menghasilkan lulusan sebagai tenaga terdidik dan terampil yang mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam negeri dan mampu bersaing dengan tenaga terampil asing. Arah kebijakan untuk

mendorong PTS agar memberikan pelayanan pendidikan bermutu dimulai dengan memfasilitasi dosen untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi, baik dosen yang diangkat oleh pemerintah maupun dosen tetap yang diangkat oleh yayasan. Dosen perlu dimotivasi untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sementara pemerintah menyediakan kesempatan tersebut dengan memberikan beasiswa. Di sisi lain kompetensi dosen dapat ditingkatkan dengan menyediakan kesempatan untuk melakukan seminar, workshop, dan pelatihan baik dalam bidang pengajaran, seperti renovasi kurikulum, membuat rencana pembelajaran semester, dan metoda penilaian, maupun metoda penelitian, penulisan karya tulis, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Di samping dosen, penentu mutu lulusan yaitu mahasiswanya itu sendiri. Pengembangan *softskills*, kewirausahaan, dan daya juang untuk bersaing perlu senantiasa difasilitasi oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi memerlukan bantuan *role model* pemberdayaan mahasiswa dan dosen dalam peningkatan pengembangan diri. Kopertis berperan sebagai fasilitator dalam meningkatkan kemampuan *softskills* melalui penyelenggaraan workshop dan training. Di sisi lain daya kompetitif mahasiswa juga sangat diperlukan untuk ditingkatkan melalui berbagai kompetisi, agar terbiasa menghadapi persaingan di kehidupan bermasyarakat kelak. Selain Kopertis patut memberi penghargaan kepada mahasiswa, dosen dan tenaga pendidik cemerlang, di balik itu Kopertis mendorong agar setiap PTS memiliki budaya menghargai prestasi insan kampus yang dilaksanakan secara reguler.

Peningkatan kualitas pendidikan tinggi, tidak semata-mata pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana, namun yang lebih penting lagi adalah bagaimana PTS dapat diselenggarakan oleh yayasan yang legal dan tanpa konflik di dalamnya. Suasana harmonis antara penyelenggara dan pengelola merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan tinggi. Acap kali PTS mengabaikan tinjau ulang Statuta yang menjadi buku pedoman bagi pengelolaan PTS. Dengan adanya pedoman yang selalu ditinjau ulang, maka PTS tidak akan keliru dalam memilih pengembangan program studi ke depan. Sementara pada saat menjalankan kehidupan kampus, perlu ada jaminan mutu yang diterapkan oleh pimpinan melalui unit yang ditunjuk untuk mengaplikasikan sistem yang baik dan tepat. Dalam hal ini, sistem penjaminan mutu menjadi penting dijalankan di internal kampus. Luaran dari sistem

penjaminan mutu internal akan menjadi masukan bagi sistem penjaminan mutu eksternal guna mengevaluasi penerapan standar nasional pendidikan tinggi di PTS. Belum semua PTS dapat menerapkan sistem penjaminan mutu, bahkan masih ada PTS yang belum mengenal secara baik. Struktur Pimpinan yang acapkali berganti dalam kampus menjadi penghambat keberlangsungan penerapan sistem penjaminan mutu internal. Kopertis perlu memberikan pencerahan secara terus menerus kepada PTS tanpa membedakan bentuk perguruan tingginya.

Dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada PTS dan pemangku kepentingan lainnya. Kopertis senantiasa berupaya untuk berubah mewujudkan sistem pelayanan yang lebih bersih, lebih akuntabel, efektif dan produktif. Dalam era digital saat ini pelayanan harusnya lebih cepat, tepat, dan mudah. Pelayanan secara elektronik diyakini akan lebih memudahkan kepada pemangku kepentingan, baik pimpinan PTS, dosen, mahasiswa maupun tenaga kependidikan. Pelayanan berbasis internet senantiasa harus ditingkatkan kualitasnya dan juga kuantitasnya. Di samping akan lebih cepat, data dan informasi yang selama ini disimpan dalam bentuk berkas *hardcopy* akan berangsur hilang dan akan terpelihara keberadaannya guna memudahkan kemampu-telusurannya. Dengan demikian penguatan sistem pelayanan dan sumberdaya sangat diperlukan oleh Kopertis dalam rangka memberikan pelayanan lebih prima.

6. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017.

Kopertis Wilayah III menetapkan Perjanjian Kinerja, merupakan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelola.

Tujuan khusus ditetapkan Perjanjian Kinerja antara lain: meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Kopertis Wilayah III telah menyelaraskan dan menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2017 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya berbasis pada rencana strategis

Kopertis Wilayah III tahun 2015-2019. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2017 selengkapnya dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja (PK) Kopertis Wilayah III Tahun 2017.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017
Meningkatnya sistem dan kualitas/kuantitas sumber daya	Jumlah Layanan Berbasis Elektronik	17 Layanan
	Prosentase Daya Serap Keuangan	95 %
	Nilai Sasaran Kinerja Pegawai	90 %
Meningkatnya relevansi, kuantitas dan kualitas pendidikan tinggi	Jumlah Perguruan Tinggi Berakreditasi A (Unggul)	9 PTS
	Prosentase Dosen Berkualifikasi S3	11,4 %
	Jumlah Publikasi Internasional	25 Judul
	Prosentase Dosen Bersertifikat Pendidik	35 %
	Prosentase Prodi Terakreditasi Minimal B	56 %
	Jumlah Mahasiswa Berprestasi	2.611 Mahasiswa
	Jumlah Perguruan Tinggi Yang Masuk Top 100 Nasional	17 PTS
	Prosentase Mahasiswa Penerima Beasiswa	1,54 %
	Rasio Dosen Tetap Terhadap Jumlah Dosen	0,83
	Prosentase Dosen Dengan Jabatan Jabatan Guru Besar	1,4 %
	Prosentase Dosen Dengan Jabatan Lektor Kepala	6,95 %
	Jumlah Publikasi Nasional	189 Judul
	Rasio Dosen Tetap Terhadap Jumlah Mahasiswa	1:32,78
	Jumlah Penelitian yang Dimanfaatkan Masyarakat	28 Judul
Terlaksananya kerjasama PTS dengan pihak internasional dalam bidang tridharma perguruan tinggi	Jumlah Mahasiswa yang Berwira Usaha	66 Mahasiswa
	Prosentasi Lulusan Bersertifikat Kompetensi dan Profesi	60 %
	Jumlah Prototipe R&D	20 Buah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil, Kopertis Wilayah III secara konsisten menerapkan manajemen kinerja. Hal ini dilakukan agar kinerja Kopertis Wilayah III berubah dari cara pandang yang berorientasi proses/kegiatan menuju manajemen kinerja yang berorientasi hasil/kinerja. Untuk itu, hal-hal yang berkaitan dengan kinerja seperti tujuan, sasaran, target, capaian, indikator kinerja menjadi titik tolak manajemen, yang dirumuskan secara seksama, jelas dan akurat serta ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Kopertis Wilayah III telah menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai dalam periode 2015 s.d. 2019 yaitu:

1. Meningkatnya sistem dan kualitas/kuantitas sumber daya;
2. Meningkatnya relevansi, kuantitas dan kualitas Pendidikan tinggi; dan
3. Terlaksananya kerjasama PTS dengan pihak internasional dalam bidang tridharma perguruan tinggi.

Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2015-2019	Capaian 2016	Tahun 2017		
				Target	Realisasi	%
Meningkatnya sistem dan kualitas/kuantitas sumber daya	Jumlah Layanan Berbasis Elektronik	21	16	17	18	105,88
	Prosentase Daya Serap Keuangan	99	97	95	98	103,16
	Nilai Sasaran Kinerja Pegawai	93	88	90	91,37	101,52
Meningkatnya relevansi, kuantitas dan kualitas pendidikan tinggi	Jumlah Perguruan Tinggi Berakreditasi A (Unggul)	15	6	9	11	122,22
	Prosentase Dosen Berkualifikasi S3	14	11,22	11,4	12,78	112,11
	Jumlah Publikasi Internasional	350	225	25	1.351	5.404

	Prosentase Dosen Bersertifikat Pendidik	45	30,78	35	35,42	101,2
	Prosentase Prodi Terakreditasi Minimal B	60	45	56	57,3	102,32
	Jumlah Mahasiswa Berprestasi	4.000	2.500	2.611	2.200	84,26
	Jumlah Perguruan Tinggi Yang Masuk Top 100 Nasional	22	10	17	10	58,82
	Prosentase Mahasiswa Penerima Beasiswa	1,6	1,4	1,54	1,11	72,08
	Rasio Dosen Tetap Terhadap Jumlah Dosen	90	0,6	0,83	0,82	98,8
	Prosentase Dosen Dengan Jabatan Guru Besar	1	1,28	1,4	1,08	77,14
	Prosentase Dosen Dengan Jabatan Lektor Kepala	10	6,83	6,95	6,23	89,64
	Jumlah Publikasi Nasional	4.500	3.000	189	1.607	850,26
	Rasio Dosen Tetap Terhadap Jumlah Mahasiswa	30	32	32,78	30,51	93,08
	Jumlah Penelitian yang Dimanfaatkan Masyarakat	700	550	28	607	2.167,86
Terlaksananya kerjasama PTS dengan pihak internasional dalam bidang tridharma perguruan tinggi	Jumlah Mahasiswa Yang Berwirausaha	3.500	2.000	66	174	263,64
	Prosentase Lulusan Bersertifikat Kompetensi dan Profesi	75	50	60	70,5	117,5
	Jumlah Prototipe R&D	20	15	20	307	1.535

Untuk capaian kinerja **Sasaran Strategis** tercermin pada capaian indikator kinerja. Dari tabel 6 diatas menunjukkan capaian indikator kinerja Kopertis Wilayah III tahun 2017, bahwa secara umum target kinerja berhasil dipenuhi, bahkan terdapat capaian yang melebihi target yang telah ditentukan.

Secara lebih detil capaian indikator kinerja dijelaskan dalam capaia kinerja sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1:

Meningkatnya sistem dan kualitas/kuantitas sumber daya

Dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada PTS dan pemangku kepentingan lainnya. Kopertis senantiasa berupaya untuk berubah mewujudkan sistem pelayanan yang lebih bersih, lebih akuntabel, efektif dan produktif. Dalam era digital saat ini pelayanan harusnya lebih cepat, tepat, dan mudah. Pelayanan secara elektronik diyakini akan lebih memudahkan kepada pemangku kepentingan, baik pimpinan PTS, dosen, mahasiswa maupun tenaga kependidikan. Pelayanan berbasis internet senantiasa harus ditingkatkan kualitasnya dan juga kuantitasnya. Di samping akan lebih cepat, data dan informasi yang selama ini disimpan dalam bentuk berkas *hardcopy* akan berangsur hilang dan akan terpelihara keberadaannya guna memudahkan kemampu-telusurannya. Dengan demikian penguatan sistem pelayanan dan sumber daya sangat diperlukan oleh Kopertis dalam rangka memberikan pelayanan lebih prima.

Sasaran strategis ini capaiannya diukur oleh 3 (tiga) indikator kinerja, dengan rincian tingkat pencapaian sebagai berikut:

Tabel 7. Capaian Sasaran Strategis 1 Tahun 2017.

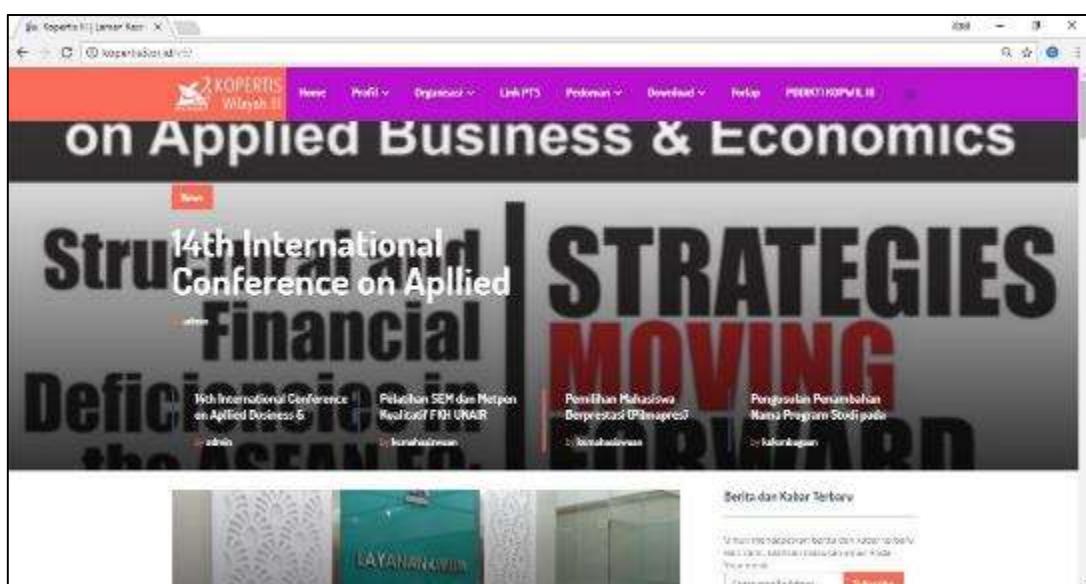
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2015-2019	Capaian 2016	Tahun 2017		
				Target	Realisasi	%
Meningkatnya sistem dan kualitas/kuantitas sumber daya	Jumlah Layanan Berbasis Elektronik	21	16	17	18	105,88
	Prosentase Daya Serap Keuangan	99	97	95	98	103,16
	Nilai Sasaran Kinerja Pegawai	93	88	90	91,37	101,52

Berdasarkan data kinerja diatas dapat dijelaskan bahwa dari 3 (tiga) indikator kinerja yang ada untuk mengukur sasaran strategis, seluruh indikator kinerja telah mencapai target bahkan melebihi.

Untuk rincian analisis capaian setiap indikator kinerja diuraikan sebagai berikut:

1. Jumlah Layanan Berbasis Elektronik.

Kecenderungan yang diharapkan oleh masyarakat dalam menyikapi perubahan global adalah terselenggaranya pelayanan publik secara prima, dengan berpedoman pada standar layanan publik yang ditetapkan pemerintah. Penyelenggaraan pelayanan publik yang baik menjadi dasar perubahan tata kelola pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan salah satu solusi perbaikan pelayanan publik, sehingga akan mempermudah proses, mempersingkat waktu, menghemat biaya, dan mengoptimalkan sumber daya.



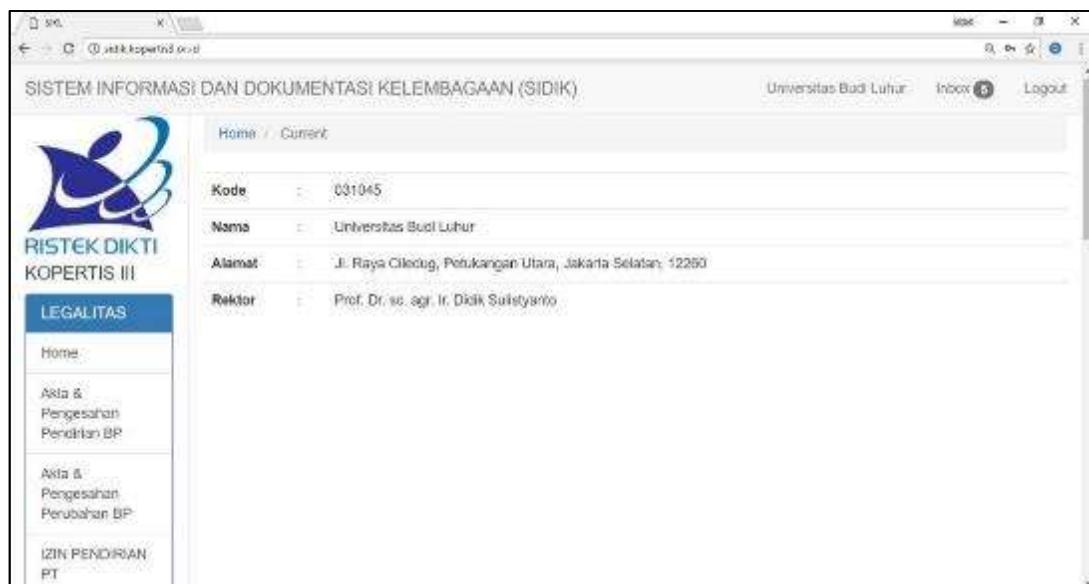
Gambar 2. Tampilan laman Kopertis Wilayah III sesudah dilakukan pengembangan.

Salah satu indikator kualitas dan keberhasilan dalam melaksanakan pelayanan publik secara prima adalah dengan melihat seberapa banyak jumlah layanan berbasis elektronik yang dimiliki. Pada tahun 2017 ditargetkan jumlah layanan berbasis elektronik yang ada di Kopertis Wilayah III berjumlah 17 (tujuabelas) layanan, sedangkan pada akhir tahun 2016 baru terdapat 16 (enambelas) layanan dari target 21 (duapuluhan satu) layanan berbasis elektronik pada akhir tahun 2019.

Keberhasilan Kopertis Wilayah III dalam upaya peningkatan pelayanan publik secara prima, akuntabel, efektif dan efisien dengan mengadakan sosialisasi kepada tenaga administrasi tentang Standar Operasional Pelayanan (SOP) Mikro dan Makro, melakukan Survey Kepuasan Pelayanan Publik dan menyusun Peta Jalan Reformasi Birokrasi.

Sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah layanan berbasis elektronik dapat dicapai sebanyak 18 (delapanbelas) layanan. Tercapainya indikator jumlah layanan berbasis elektronik dikarenakan adanya dukungan kegiatan:

1. Pengembangan Website Kopertis;
2. Rancangan Sistem Informasi Kelembagaan; dan
3. Program Hibah Penguatan Kopertis.



Gambar 3. Tampilan Sistem Informasi dan Dokumentasi Kelembagaan (SIDIK).

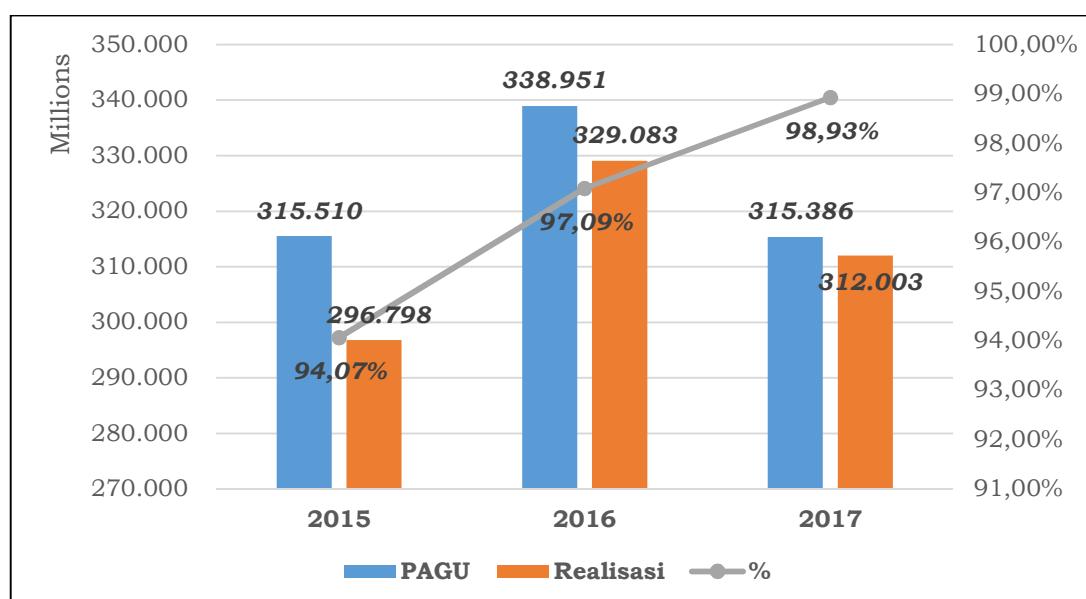
2. Prosentase Daya Serap Keuangan.

Dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kopertis Wilayah III terus melaksanakan berbagai upaya perbaikan, dengan tujuan untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan berorientasi hasil. Oleh karena itu dalam rangka membangun sinergi pelaksanaan SAKIP untuk peningkatan kinerja di Kopertis Wilayah III, telah dilakukan berbagai agenda penguatan akuntabilitas kinerja.

Pada tahun 2017, dimulai dengan membangun fondasi penguatan akuntabilitas keuangan yang dilakukan di semua komponen yang merupakan bagian integral dari SAKIP meliputi aspek perencanaan, pengukuran, pengelolaan data, dan pelaporan. Dengan memperhatikan secara cermat hasil capaian daya serap keuangan di tahun sebelumnya, perbaikan dan penguatan diantaranya juga difokuskan pada hal-hal yang menjadi catatan penting dan rekomendasi hasil evaluasi yang dilakukan Satuan Pengawas Intern.

Salah satu indikator kualitas dan keberhasilan dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan adalah dengan melihat seberapa besar prosentase daya serap keuangan yang dicapai. Pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 95%, sedangkan pada akhir tahun 2016 sudah sebesar 97% dari target pada tahun 2019 sebesar 99%.

Keberhasilan Kopertis Wilayah III dalam upaya peningkatan akuntabilitas keuangan dengan cara bersinergi dengan Satuan Pengawas Intern untuk melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan anggaran yang andal, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan produktif.



Grafik 2. Perkembangan Daya Serap Keuangan Kopertis Wilayah III.

Sampai dengan akhir tahun 2017, prosentase daya serap keuangan dapat dicapai sebesar 98,93%. Tercapainya indikator prosentase daya serap keuangan dikarenakan adanya dukungan kegiatan:

1. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran; dan
2. Penyusunan SP-4.
3. Nilai Sasaran Kinerja Pegawai.

Suatu proses rangkaian manajemen kinerja yang berawal dari penyusunan perencanaan kinerja yang berupa Sasaran Kerja Pegawai (SKP), penetapan tolok ukur yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya dari setiap kegiatan tugas jabatan. Pelaksanaan penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target yang telah ditetapkan. Dalam melakukan penilaian dilakukan analisis terhadap hambatan pelaksanaan pekerjaan untuk mendapatkan umpan balik serta menyusun rekomendasi perbaikan dan menetapkan hasil penilaian.



Gambar 4. Narasumber Menjelaskan Materi kinerja dosen PNS yang ditugaskan pada PTS di lingkungan Kopertis Wilayah III.

Pada tahun 2017, dimulai dengan membangun fondasi penguatan akuntabilitas kinerja yang dilakukan di semua komponen yang merupakan bagian integral dari SAKIP meliputi aspek perencanaan, pengukuran, pengelolaan data, dan pelaporan kinerja pegawai. Dengan memperhatikan secara cermat hasil penilaian sasaran kinerja pegawai di tahun sebelumnya, perbaikan dan penguatan diantaranya juga difokuskan pada hal-hal yang menjadi catatan penting dan rekomendasi hasil evaluasi yang dilakukan oleh atasan langsung dari pegawai yang bersangkutan.

Salah satu indikator kualitas dan keberhasilan dalam meningkatkan prestasi kerja pegawai adalah dengan melihat seberapa nilai sasaran kinerja pegawai yang mencapai target. Pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 90%, sedangkan pada akhir tahun 2016 sudah sebesar 88% dari target pada tahun 2019 sebesar 93%.

Keberhasilan Kopertis Wilayah III dalam upaya peningkatan nilai sasaran kinerja pegawai dengan cara bersinergi dengan PTS, untuk melakukan pengembangan potensi dan karir melalui pengembangan lingkungan kerja, serta dengan meningkatkan kompetensi, kinerja dan wawasan PNS.



Gambar 5. Pegawai sedang mengikuti pelatihan kompetensi non gelar.

Sampai dengan akhir tahun 2017, nilai sasaran kinerja pegawai didapat sebesar 91,37%. Tercapainya indikator nilai sasaran kinerja pegawai dikarenakan adanya dukungan kegiatan:

1. Pengawasan Kinerja Dosen PNS DPK;
2. Monitoring dan Evaluasi; serta
3. Pelatihan Kompetensi Non Gelar Tenaga Kependidikan.

Sasaran Strategis 2:

Meningkatnya relevansi, kuantitas dan kualitas pendidikan tinggi

Peningkatan kualitas pendidikan tinggi, tidak semata-mata pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana, namun yang lebih penting lagi adalah bagaimana PTS dapat diselenggarakan oleh yayasan yang legal dan tanpa konflik di dalamnya. Suasana harmonis antara penyelenggara dan pengelola merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan tinggi. Acapkali PTS mengabaikan tinjau ulang Statuta yang menjadi buku pedoman bagi pengelolaan PTS. Dengan adanya pedoman yang selalu ditinjau ulang, maka PTS tidak akan keliru dalam memilih pengembangan program studi ke depan. Sementara pada saat menjalankan kehidupan kampus, perlu ada jaminan mutu yang diterapkan oleh pimpinan melalui unit yang ditunjuk untuk mengaplikasikan sistem yang baik dan tepat. Dalam hal ini, sistem penjaminan mutu menjadi penting dijalankan di internal kampus. Luaran dari sistem penjaminan mutu internal akan menjadi masukan bagi sistem penjaminan mutu eksternal guna mengevaluasi penerapan standar nasional pendidikan tinggi di PTS. Belum semua PTS dapat menerapkan sistem penjaminan mutu, bahkan masih ada PTS yang belum mengenal secara baik. Struktur Pimpinan yang acapkali berganti dalam kampus menjadi penghambat keberlangsungan penerapan sistem penjaminan mutu internal. Kopertis perlu memberikan pencerahan secara terus menerus kepada PTS tanpa membedakan bentuk perguruan tingginya.

Sasaran strategis ini capaiannya diukur oleh 14 (empatbelas) indikator kinerja, dengan rincian tingkat pencapaian sebagai berikut:

Tabel 8. Capaian Sasaran Strategis 2 Tahun 2017.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2015-2019	Capaian 2016	Tahun 2017		
				Target	Realisasi	%
Meningkatnya relevansi, kuantitas dan kualitas Pendidikan tinggi	Jumlah Perguruan Tinggi Berakreditasi A (Unggul)	15	6	9	11	122,22
	Prosentase Dosen Berkualifikasi S3	14	11,22	11,4	12,78	112,11
	Jumlah Publikasi Internasional	350	225	25	1.351	5.404
	Prosentase Dosen Bersertifikat Pendidik	45	30,78	35	35,42	101,2
	Prosentase Prodi Terakreditasi Minimal B	60	45	56	57,3	102,32
	Jumlah Mahasiswa Berprestasi	4.000	2.500	2.611	2.200	84,26
	Jumlah Perguruan Tinggi Yang Masuk Top 100 Nasional	22	10	17	10	58,82
	Prosentase Mahasiswa Penerima Beasiswa	1,6	1,4	1,54	1,11	72,08
	Rasio Dosen Tetap Terhadap Jumlah Dosen	90	0,6	0,83	0,82	98,8
	Prosentase Dosen Dengan Jabatan Guru Besar	1	1,28	1,4	1,08	77,14
	Prosentase Dosen Dengan Jabatan Lektor Kepala	10	6,83	6,95	6,23	89,64
	Jumlah Publikasi Nasional	4.500	3.000	189	1.607	850,26
	Rasio Dosen Tetap Terhadap Jumlah Mahasiswa	30	32	32,78	30,51	93,08
	Jumlah Penelitian yang Dimanfaatkan Masyarakat	700	550	28	607	2.167,86

Berdasarkan data kinerja diatas dapat dijelaskan bahwa dari 14 (empat belas) indikator kinerja yang ada untuk mengukur sasaran, ada 1 (satu) indikator kinerja yang belum mencapai target dengan prosentase capaian dibawah 70%, ada 6 (enam) indikator kinerja

yang mencapai target dengan prosentase capaian antara 70% sampai dengan 100%, sedangkan 7 (tujuh) indikator kinerja yang melebihi dari target.

Untuk rincian analisis capaian setiap indikator kinerja diuraikan sebagai berikut:

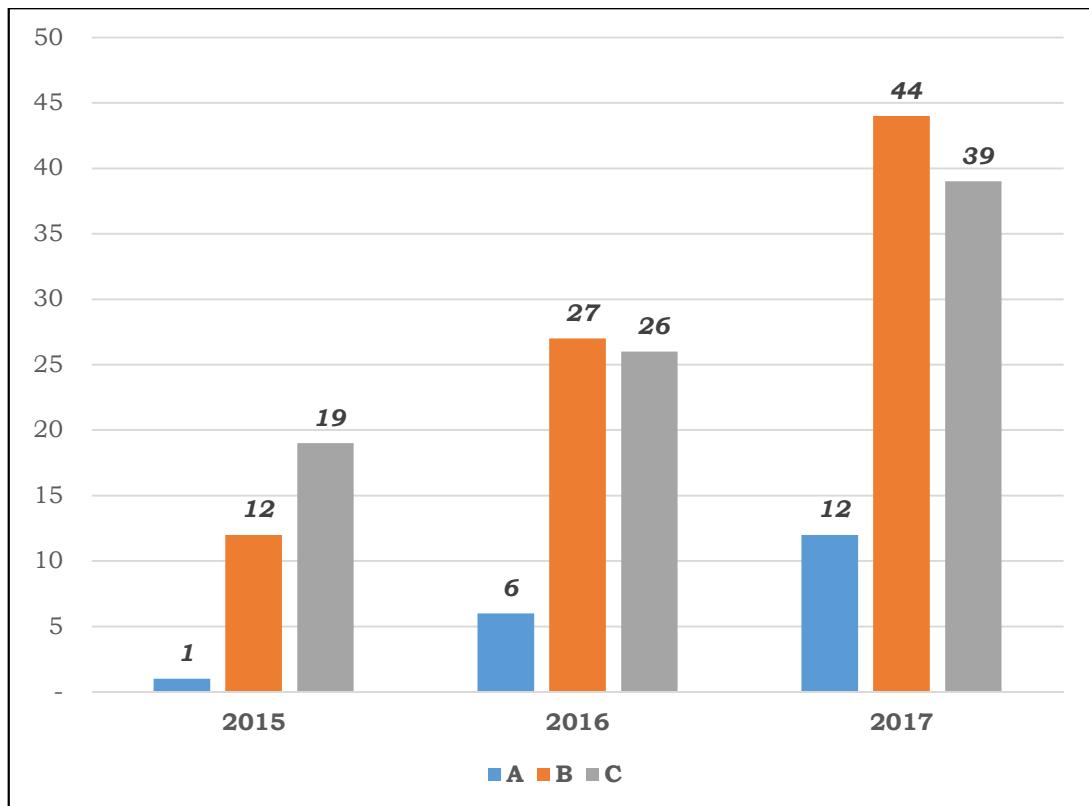
1. Jumlah Perguruan Tinggi Berakreditasi A (Unggul).

Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Perguruan Tinggi yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Penetapan akreditasi oleh BAN-PT dilakukan dengan menilai proses dan kinerja serta keterkaitan antara tujuan, masukan, proses, dan keluaran suatu perguruan tinggi, yang merupakan tanggung jawab perguruan tinggi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah juga memerlukan dukungan dan peran serta Perguruan Tinggi Swasta sebagai penyelenggara institusi pendidikan tinggi untuk mewujudkan pendidikan berkualitas. Akreditasi merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dalam rangka menentukan kelayakan dan penjaminan mutu sebuah perguruan tinggi.

Salah satu indikator kualitas dan keberhasilan dalam proses pengawasan, pengendalian dan pembinaan PTS adalah dengan melihat seberapa banyak jumlah perguruan tinggi berakreditasi A (Unggul). Pada tahun 2017 ditargetkan jumlah perguruan tinggi berakreditasi A (Unggul) yang ada terdapat di Kopertis Wilayah III sebanyak 9 (sembilan) PTS, sedangkan pada akhir tahun 2016 baru terdapat 6 (enam) PTS dari target 15 (limabelas) PTS berakreditasi A (Unggul) pada akhir tahun 2019.

Keberhasilan Kopertis Wilayah III dalam upaya peningkatan perguruan tinggi berakreditasi A (Unggul) dengan mengadakan bimbingan teknis penjaminan mutu dan penyusunan statuta.



Grafik 3. Akreditasi Institusi PTS di lingkungan Kopertis Wilayah III.

Sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah perguruan tinggi berakreditasi A (Unggul) dapat dicapai sebanyak 11 (sebelas) PTS. Tercapainya jumlah perguruan tinggi berakreditasi A (Unggul) dikarenakan adanya dukungan kegiatan:

1. Semiloka SPMI;
2. Semiloka SPME;
3. Semiloka Penyusunan Statuta PTS;
4. Sosialisasi dan Pelatihan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO); dan
5. Program Hibah Penguatan Kopertis.



Gambar 6. Narasumber Menjelaskan Materi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Kepada Peserta Semiloka.

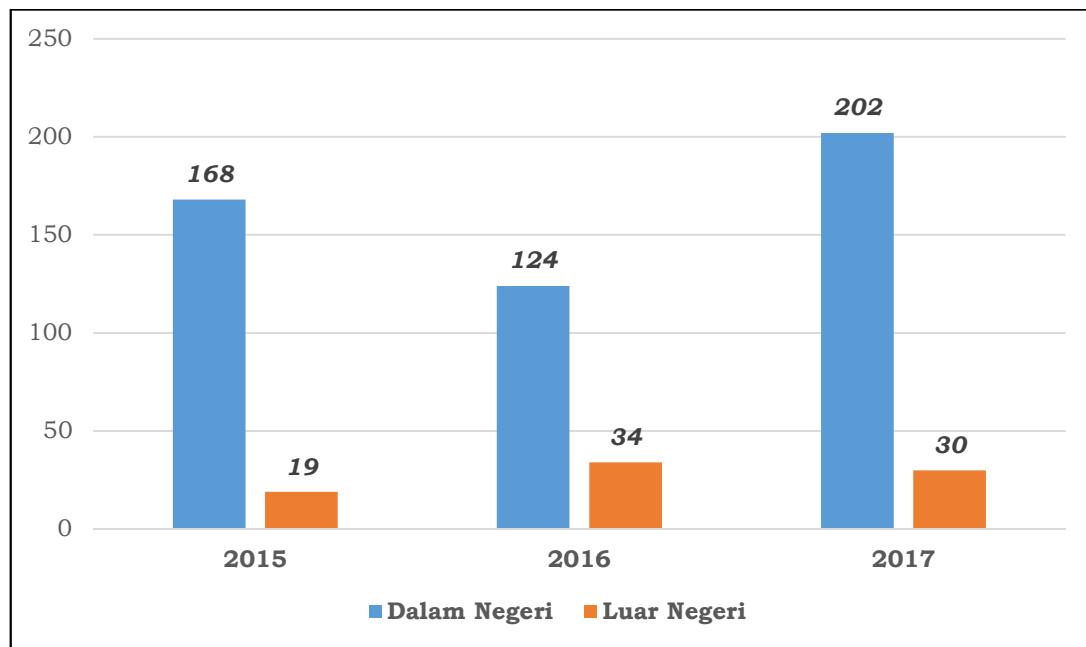
2. Prosentase Dosen Berkualifikasi S3.

Kebijakan untuk mendorong PTS agar memberikan pelayanan pendidikan bermutu dimulai dengan memfasilitasi dosen untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi, baik dosen yang diangkat oleh pemerintah maupun dosen tetap yang diangkat oleh yayasan. Dosen perlu dimotivasi untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sementara pemerintah menyediakan kesempatan tersebut dengan memberikan beasiswa.

Salah satu indikator kualitas dan keberhasilan dalam proses pengawasan, pengendalian dan pembinaan dosen adalah dengan melihat seberapa banyak prosentase dosen berkualifikasi S3. Pada tahun 2017 ditargetkan prosentase dosen berkualifikasi S3 di Kopertis Wilayah III sebesar 11,4%, sedangkan pada akhir tahun 2016 baru terdapat 11,22% dari target 14% dosen berkualifikasi S3 pada akhir tahun 2019.

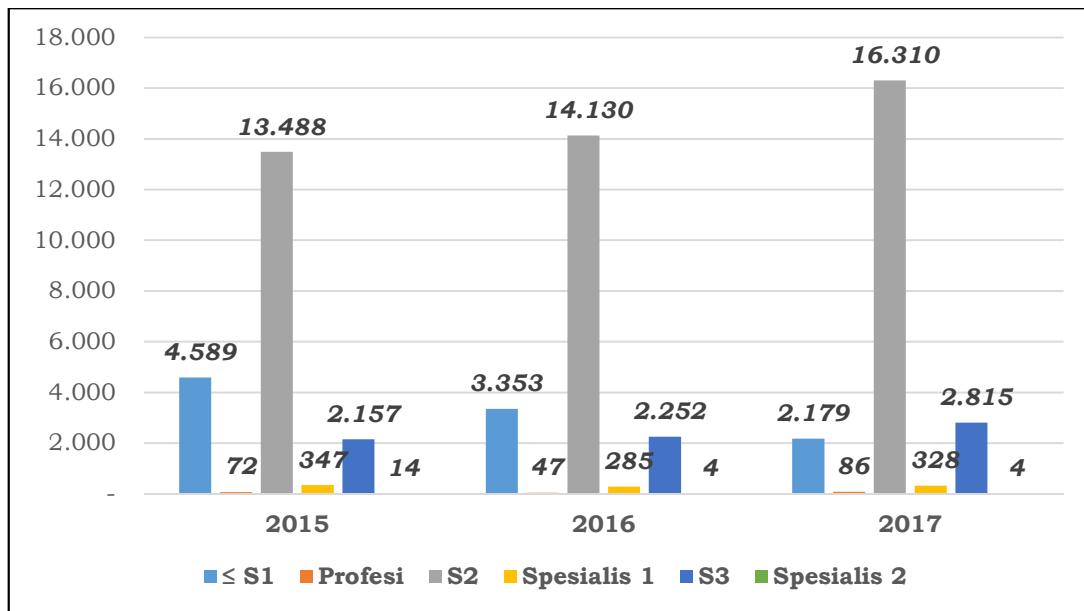
Permasalahan utama yang dihadapi dalam upaya peningkatan prosentase dosen berkualifikasi S3 dikarenakan peran Kopertis Wilayah III sanya sampai memberikan rekomendasi dosen untuk dapat mengikuti program Beasiswa Unggulan Dosen

Indonesia Dalam dan Luar Negeri. Selain itu pendataan yang dilakukan terhadap hasil kelulusan dosen dalam menyelesaikan program beasiswa dosen belum berjalan secara optimal disebabkan proses penyampaian laporan studi yang tidak dilaporkan oleh dosen penerima program beasiswa sehingga banyak dosen yang telah menyelesaikan studi tidak terdata dengan baik.



Grafik 4. Rekomendasi Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia.

Sampai dengan akhir tahun 2017, prosentase dosen berkualifikasi S3 dapat dicapai sebanyak 12,78%. Tercapainya prosentase dosen berkualifikasi S3 dikarenakan adanya dukungan program Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia Dalam dan Luar Negeri dari Direktorat Sumber Daya Iptek dan Dikti, Kemristekdikti.



Grafik 5. Kualifikasi Akademi Dosen di lingkungan Kopertis Wilayah III.

3. Jumlah Publikasi Internasional.

Salah satu ukuran produktifitas hasil iptek adalah publikasi baik dalam publikasi nasional maupun internasional yang bereputasi. Untuk merealisasikan kinerja publikasi ilmiah di jurnal internasional, maka diupayakan dosen melakukan penelitian yang lebih fokus pada permasalahan kebutuhan strategis baik bersifat penelitian lokal, nasional maupun internasional dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di perguruan tinggi.

Salah satu indikator kualitas dan keberhasilan dalam proses pengawasan, pengendalian dan pembinaan dosen adalah dengan melihat seberapa banyak jumlah publikasi internasional. Pada tahun 2017 ditargetkan jumlah publikasi internasional sebanyak 25 judul, sedangkan pada akhir tahun 2016 sudah terdapat 225 judul dari target 350 judul publikasi internasional pada akhir tahun 2019.

Permasalahan utama yang dihadapi Kopertis Wilayah III dalam upaya peningkatan jumlah publikasi internasional dikarenakan kurangnya kegiatan monitoring dan evaluasi serta pendampingan kepada dosen untuk mengembangkan penelitian agar dapat dipublikasikan pada tingkat internasional. Selain itu pendataan yang dilakukan

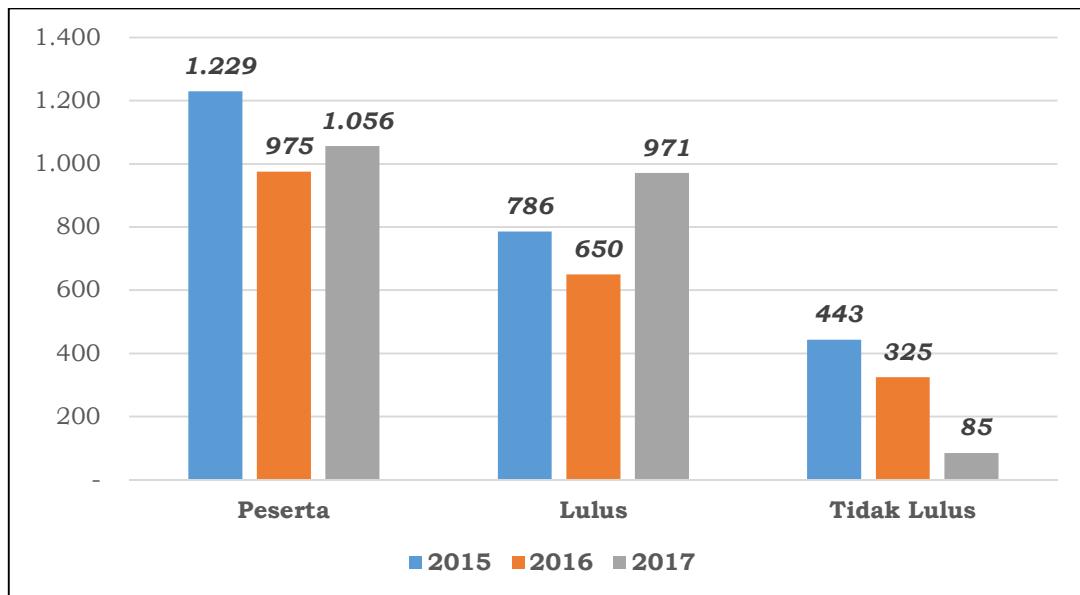
terhadap penelitian yang dipublikasikan pada tingkat internasional belum berjalan secara optimal sehingga banyak hasil publikasi internasional tidak terdata.

Sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah publikasi internasional dapat dicapai sebanyak 1.351 judul. Tercapainya jumlah publikasi internasional dikarenakan adanya dukungan kegiatan:

1. Bimbingan Teknis Penulisan Artikel Jurnal Internasional; dan
 2. Bimbingan Teknis Metodologi Penelitian Dosen.
4. Prosentase Dosen Bersertifikat Pendidik.

Sertifikasi pendidik untuk dosen merupakan upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional dan memperbaiki kesejahteraan dosen dengan mendorong dosen untuk secara berkelanjutan meningkatkan profesionalismenya. Sertifikat pendidik yang diberikan kepada dosen melalui proses sertifikasi adalah bukti formal pengakuan terhadap dosen sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi.

Salah satu indikator kualitas dan keberhasilan dalam proses pengawasan, pengendalian dan pembinaan dosen adalah dengan melihat seberapa banyak prosentase dosen bersertifikat pendidik. Pada tahun 2017 ditargetkan prosentase dosen bersertifikat pendidik di Kopertis Wilayah III sebesar 35%, sedangkan pada akhir tahun 2016 baru terdapat 30,78% dari target 45% dosen bersertifikat pendidik pada akhir tahun 2019.



Grafik 6. Hasil Sertifikasi Dosen.

Keberhasilan Kopertis Wilayah III dalam upaya prosentase dosen bersertifikat pendidik melalui kegiatan sosialisasi kepada peserta sertifikasi dosen tentang tata cara penggunaan aplikasi sertifikasi dosen yang dilaksanakan melalui daring (online).



Gambar 7. Narasumber Memberikan Paparan Mengenai Aplikasi Sertifikasi Dosen Kepada Peserta Sosialisasi.

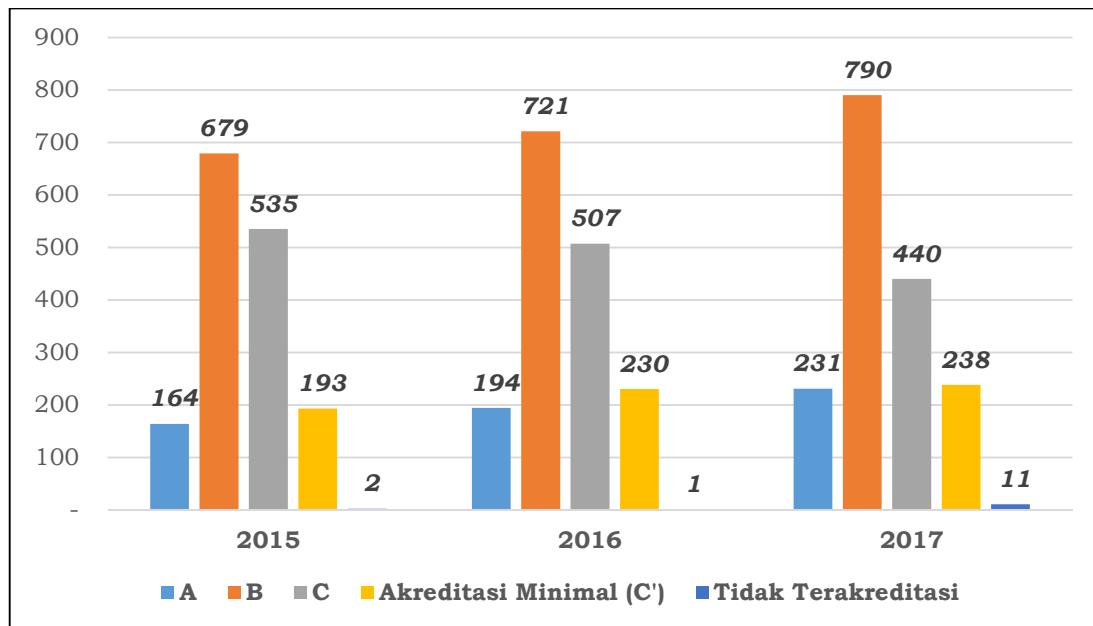
Sampai dengan akhir tahun 2017, prosentase dosen bersertifikat pendidik dapat dicapai sebanyak 35,42%. Tercapainya prosentase dosen bersertifikat pendidik karena didukung dengan kegiatan sosialisasi calon sertifikasi dosen.

5. Prosentase Prodi Terakreditasi Minimal B.

Program studi merupakan satu kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. Sebagai kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran, program studi dapat diselenggarakan bila telah memenuhi persyaratan minimum akreditasi dan wajib diakreditasi ulang saat jangka waktu akreditasinya berakhir.

Salah satu penilaian mutu perguruan tinggi adalah peringkat akreditasi setiap program studi yang ada pada Perguruan Tinggi tersebut. Dengan demikian, peringkat akreditasi program studi mencerminkan kualitas suatu perguruan tinggi. Oleh karena itu, menjadi kewajiban Kopertis Wilayah III untuk mengawal peningkatan program studi menjadi minimal B menjadi salah satu indikator kinerja. Upaya berkelanjutan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dari program studi dan perguruan tinggi memegang peran penting sebagai komponen utama dalam sistem pembelajaran pada suatu perguruan tinggi.

Salah satu indikator kualitas dan keberhasilan dalam proses pengawasan, pengendalian dan pembinaan PTS adalah dengan melihat seberapa banyak prosentase program studi terakreditasi minimal B. Pada tahun 2017 ditargetkan prosentase program studi terakreditasi minimal B di Kopertis Wilayah III sebesar 56%, sedangkan pada akhir tahun 2016 baru terdapat 45% dari target 60% program studi terakreditasi minimal B pada akhir tahun 2019.



Grafik 7. Akreditasi Program Studi.

Keberhasilan Kopertis Wilayah III dalam upaya peningkatan program studi terakreditasi minimal B dengan mengadakan bimbingan teknis penjaminan mutu.



Gambar 8. Peserta Melakukan Diskusi Kelompok Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Sampai dengan akhir tahun 2017, prosentase program studi terakreditasi minimal B dapat dicapai sebesar 57,3%. Tercapainya prosentase program studi terakreditasi minimal B dikarenakan adanya dukungan kegiatan:

1. Semiloka SPMI;

2. Semiloka SPME;
3. Semiloka Penyusunan Statuta PTS;
4. Sosialisasi dan Pelatihan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO);
dan
5. Program Hibah Penguatan Kopertis.
6. Jumlah Mahasiswa Berprestasi.

Tujuan pendidikan tinggi yang utama adalah mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Selain itu, untuk menghasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.

Dengan demikian, melalui fasilitasi perguruan tinggi, mahasiswa sebagai insan dewasa harus dapat mengembangkan potensi secara maksimal agar dapat memenuhi tuntutan sebagaimana diuraikan di dalam tujuan pendidikan tinggi. Mahasiswa diharapkan memiliki kecerdasan komprehensif yang menyeimbangkan antara *hardskills* dan *softskills*. Kemampuan ini dapat diperoleh mahasiswa melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Salah satu indikator kualitas dan keberhasilan dalam proses pengawasan, pengendalian dan pembinaan dibidang kemahasiswaan adalah dengan melihat seberapa banyak jumlah mahasiswa berprestasi. Pada tahun 2017 ditargetkan jumlah mahasiswa berprestasi di Kopertis Wilayah III sebanyak 2.611 mahasiswa, sedangkan pada akhir tahun 2016 baru terdapat 2.500 mahasiswa dari target 4.000 mahasiswa berprestasi pada akhir tahun 2019.

Permasalahan utama yang dihadapi Kopertis Wilayah III dalam upaya peningkatan jumlah mahasiswa berprestasi dikarenakan kurangnya kegiatan monitoring dan evaluasi serta pendampingan kepada mahasiswa untuk dapat berprestasi baik ditingkat nasional maupun internasional. Selain itu pendataan yang dilakukan

terhadap jumlah mahasiswa berprestasi belum berjalan secara optimal sehingga banyak mahasiswa yang berprestasi tidak terdata.

Sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah mahasiswa berprestasi dapat dicapai sebesar 2.200 mahasiswa. Tercapainya jumlah mahasiswa berprestasi dikarenakan adanya dukungan kegiatan:

1. Debat Bahasa Inggris (NUDC);
 2. Olimpiade Matematika dan IPA (ON-MIPA);
 3. Pemilihan Mahasiswa Berprestasi; dan
 4. Pelatihan Pengembangan Kepemimpinan Mahasiswa.
7. Jumlah Perguruan Tinggi Yang Masuk Top 100 Nasional.

Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan dengan tugas menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat harus dapat berperan sebagai sebuah institusi yang menghasilkan sumber daya manusia berkualitas. Untuk mewujudkan peran perguruan tinggi dalam pembangunan nasional tersebut perlu adanya upaya pengembangan mutu perguruan tinggi yang lebih baik.

Salah satu indikator kualitas dan keberhasilan dalam proses pengawasan, pengendalian dan pembinaan PTS adalah dengan melihat seberapa banyak jumlah perguruan tinggi yang masuk top 100 nasional. Pada tahun 2017 ditargetkan jumlah perguruan tinggi yang masuk top di Kopertis Wilayah III sebanyak 17 (tujuhbelas) PTS, sedangkan pada akhir tahun 2016 baru terdapat 10 (sepuluh) PTS dari target 22 (duapuluh dua) PTS yang masuk top 100 nasional pada akhir tahun 2019.

Permasalahan utama yang dihadapi Kopertis Wilayah III dalam upaya peningkatan perguruan tinggi yang masuk top 100 nasional dikarenakan pada tahun ini telah dilakukan penyempurnaan dari tahun sebelumnya. Penyempurnaan tersebut meliputi beberapa perubahan/penambahan indikator sehingga mengakibatkan beberapa PTS tidak dapat masuk dalam daftar top 100 nasional.

Sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah perguruan tinggi yang masuk top 100 nasional dapat dicapai sebanyak 10 (sepuluh) PTS. Tidak tercapainya perguruan tinggi yang masuk top 100 nasional dikarenakan belum optimalnya dukungan kegiatan yang dapat mendorong PTS untuk dapat mencapai mutu yang telah ditentukan, antara lain:

1. Kualitas SDM;
 2. Kualitas Kelembagaan;
 3. Kualitas Kegiatan Kemahasiswaan; dan
 4. Kualitas Penelitian dan Publikasi Ilmiah.
8. Prosentase Mahasiswa Penerima Beasiswa.

Beasiswa adalah bantuan yang diberikan kepada mahasiswa sebagai bentuk apresiasi prestasi mahasiswa ataupun berupa bantuan Biaya Pendidikan bagi mahasiswa yang mempunyai keterbatasan finansial. Beasiswa mempunyai visi untuk melahirkan insan cerdas dan kompetitif yang dapat berkontribusi kepada daya saing bangsa. Sedangkan tujuan utama dari Beasiswa adalah melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi di perguruan tinggi.

Salah satu indikator kualitas dan keberhasilan pendidikan tinggi di sebuah negara ialah dengan melihat besarnya jumlah masyarakat yang melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi untuk mendukung indikator tersebut dengan melihat berapa banyak prosentase mahasiswa penerima beasiswa. Pada tahun 2017 ditargetkan prosentase mahasiswa penerima beasiswa sebesar 1,54%, sedangkan pada akhir tahun 2016 baru terdapat 1,4% dari target 1,6% mahasiswa penerima beasiswa pada akhir tahun 2019.

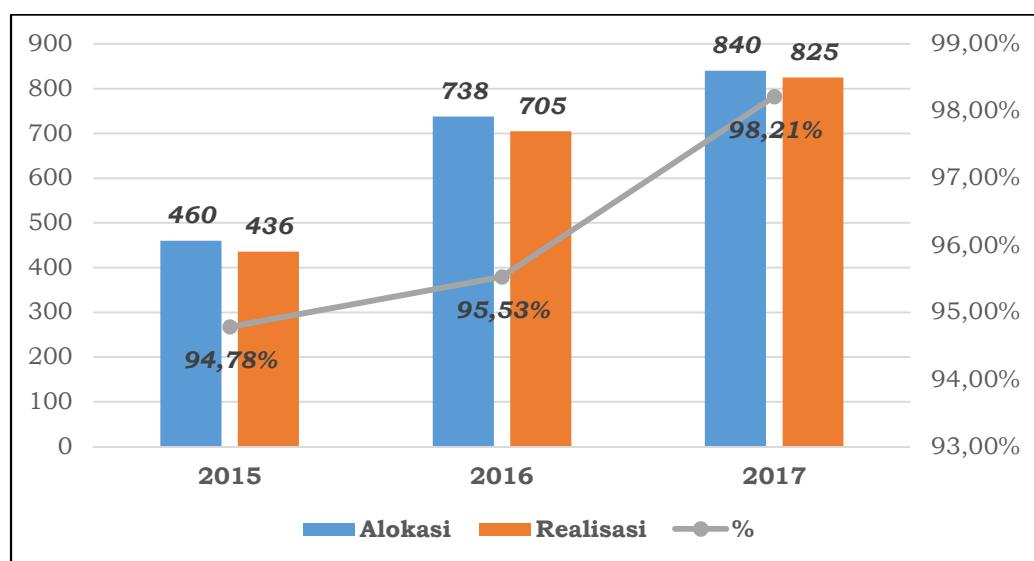
Permasalahan utama yang dihadapi dalam upaya peningkatan prosentase mahasiswa penerima beasiswa dikarenakan Kopertis Wilayah III hanya melakukan fasilitasi pemberian beasiswa yang dilaksanakan melalui hibah yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Sampai dengan akhir tahun 2017, prosentase mahasiswa penerima beasiswa dapat dicapai sebanyak 1,11%. Dalam mendukung tercapainya indikator ini Direktorat

Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, memberikan bantuan beasiswa kepada mahasiswa melalui skema:

1. Beasiswa Bidikmisi.

Bidikmisi merupakan program pemerintah untuk memberikan akses pendidikan tinggi kepada masyarakat miskin untuk dapat memutus mata rantai kemiskinan. Sehingga berkontribusi untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi. Bidikmisi juga memiliki skema yang berbeda dengan bantuan biaya pendidikan lain, dengan filosofinya untuk menjemput penerima, Bidikmisi memberikan jaminan pembiayaan mulai dari pendaftaran sampai penerima Bidikmisi menuntaskan pendidikan tinggi.



Grafik 8. Realisasi Penerima Beasiswa Bidikmisi.

2. Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA).

Pemerintah melalui Kopertis Wilayah III berupaya mengalokasikan dana untuk memberikan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa yang orang tuanya tidak mampu untuk membiayai pendidikannya, dan memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang mempunyai prestasi tinggi, baik kurikuler maupun ekstrakurikuler. Agar program bantuan biaya pendidikan dan beasiswa dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip 3T, yaitu: Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu.

9. Rasio Dosen Tetap Terhadap Jumlah Dosen.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. Berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah perlu memfasilitasi dan membina para pendidik, baik dosen, instruktur atau tutor di perguruan tinggi.

Banyak para profesional dari instansi pemerintah maupun swasta baik yang masih aktif maupun sudah purna tugas, dan secara kualifikasi memenuhi persyaratan sebagai dosen di perguruan tinggi saat ini dimanfaatkan sebagai dosen tidak tetap untuk memberikan jaminan bahwa perguruan tinggi swasta mampu memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.

Salah satu indikator kualitas dan keberhasilan dalam proses pengawasan, pengendalian dan pembinaan PTS adalah dengan melihat seberapa besar rasio dosen tetap terhadap jumlah dosen. Pada tahun 2017 ditargetkan rasio dosen tetap terhadap jumlah dosen sebesar 1:0,83, sedangkan pada akhir tahun 2016 baru terdapat 1:0,6, dari target 1:0,9 rasio dosen tetap terhadap jumlah dosen pada akhir tahun 2019.

Keberhasilan Kopertis Wilayah III dalam upaya peningkatan rasio dosen tetap terhadap jumlah dosen dengan mengadakan monitoring dan evaluasi dalam proses belajar mengajar guna meningkatkan proses penjaminan mutu.

Sampai dengan akhir tahun 2017, rasio dosen tetap terhadap jumlah dosen dapat dicapai sebesar 1:0,82. Tercapainya rasio dosen tetap terhadap jumlah dosen dikarenakan adanya dukungan kegiatan:

1. Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA); dan
2. Monitoring dan Evaluasi PTS.

10. Prosentase Dosen Dengan Jabatan Guru Besar.

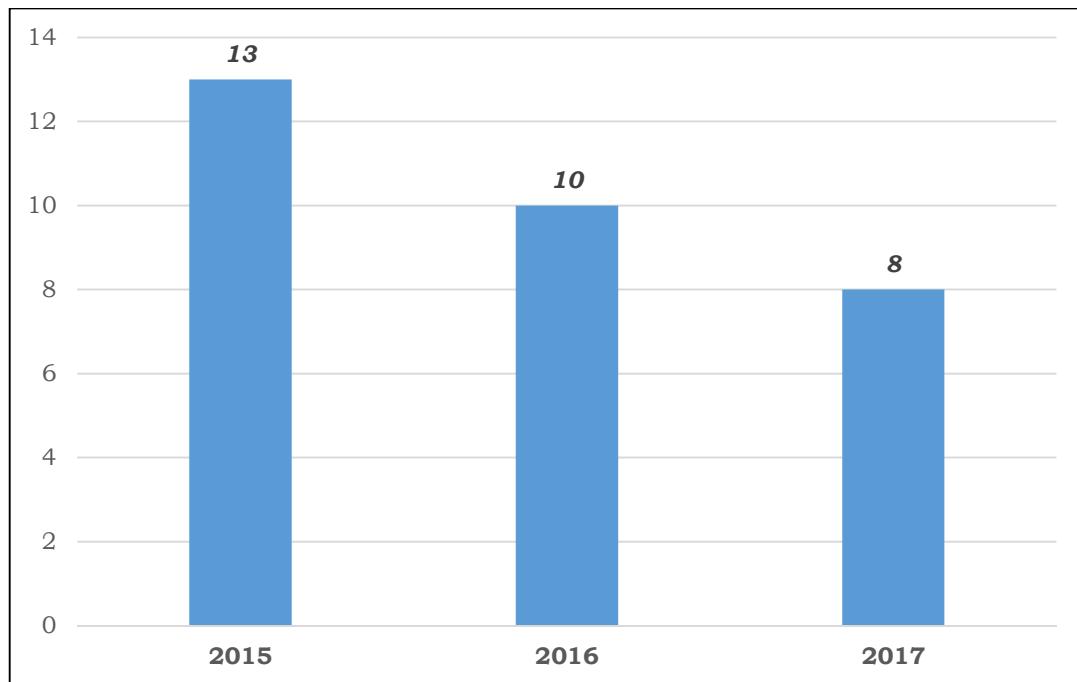
Dosen sebagai salah satu komponen terpenting dalam pendidikan tinggi mempunyai peran yang sangat signifikan bagi PT untuk menjalankan fungsinya. Lebih dari itu, peran dosen diharapkan dapat mengejar kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan,

teknologi dan seni dari negara-negara lain terutama negara-negara di Asia. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, maka peran dan tugas pokok dosen telah berkembang dari yang semula lebih ditekankan pada tugas mengajar menjadi pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Perubahan yang bersifat mendasar ini menuntut penyesuaian yang bersifat mendasar pula terhadap pemahaman dan persyaratan jabatan akademik dosen.

Jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri. Guru Besar atau Profesor yang selanjutnya disebut Profesor adalah jabatan akademik tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.

Salah satu indikator kualitas dan keberhasilan dalam proses pengawasan, pengendalian dan pembinaan dosen adalah dengan melihat seberapa besar prosentase dosen dengan jabatan guru besar. Pada tahun 2017 ditargetkan prosentase dosen dengan jabatan guru besar sebesar 1,4%, sedangkan pada akhir tahun 2016 baru terdapat 1,28% dari target 1% dosen dengan jabatan guru besar pada akhir tahun 2019.

Permasalahan utama yang dihadapi Kopertis Wilayah III dalam upaya peningkatan prosentase dosen dengan jabatan guru besar dikarenakan pertumbuhan dosen yang sangat cepat, yang tidak dapat diprediksi. Hal ini mendapat pengaruh juga dengan berlakunya peraturan terbaru terkait jabatan akademik dosen sehingga usulan untuk kenaikan jabatan ke guru besar menjadi lebih sedikit.



Grafik 9. Dosen yang mendapat Jabatan Akademik Profesor.

Sampai dengan akhir tahun 2017, prosentase dosen dengan jabatan guru besar dapat dicapai sebesar 1,08%. Tercapainya prosentase dosen dengan jabatan guru besar dikarenakan adanya dukungan kegiatan:

1. Penilaian Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen; dan
2. Evaluasi Beban Kerja Dosen.

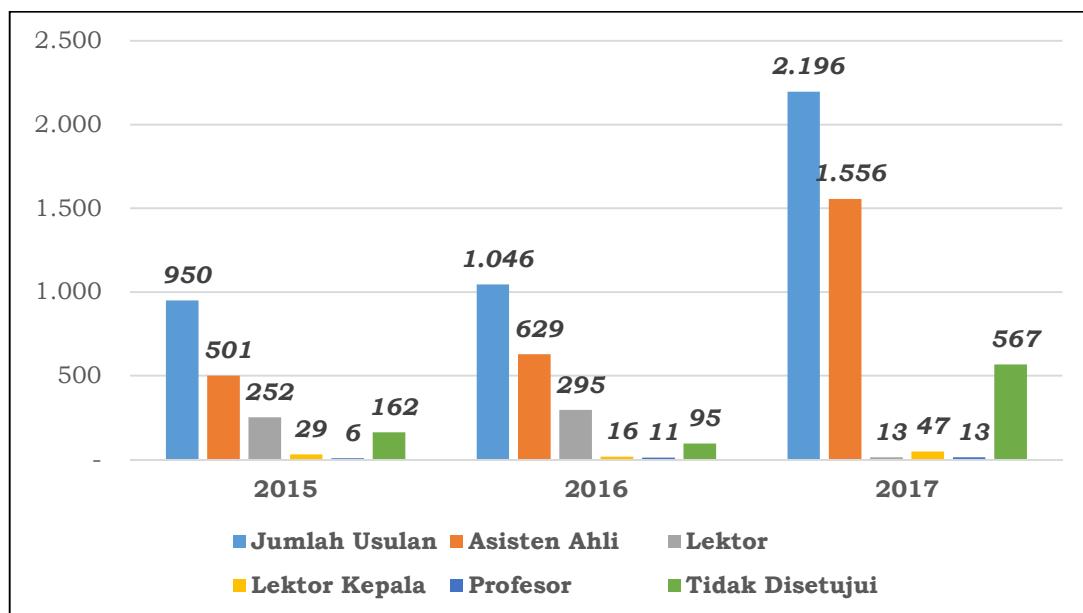
11. Prosentase Dosen Dengan Jabatan Lektor Kepala.

Jabatan akademik dosen pada dasarnya merupakan pengakuan, penghargaan dan kepercayaan atas kompetensi, kinerja, integritas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas, serta tata krama dosen dalam melaksanakan tugas tridarmanya. Selain itu jabatan ini diharapkan dapat berfungsi juga sebagai insentif non materi bagi dosen untuk bekerja lebih giat, lebih kreatif, dan lebih baik lagi. Lektor Kepala adalah jabatan akademik Dosen yang diperoleh setelah memenuhi angka kredit kumulatif paling rendah 400 (empat ratus) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu indikator kualitas dan keberhasilan dalam proses pengawasan, pengendalian dan pembinaan dosen adalah dengan melihat seberapa besar

prosentase dosen dengan jabatan lektor kepala. Pada tahun 2017 ditargetkan prosentase dosen dengan jabatan lektor kepala sebesar 6,95%, sedangkan pada akhir tahun 2016 baru terdapat 6,83 dari target 10% dosen dengan jabatan lektor kepala pada akhir tahun 2019.

Permasalahan utama yang dihadapi Kopertis Wilayah III dalam upaya peningkatan prosentase dosen dengan jabatan lektor kepala dikarenakan pertumbuhan dosen yang sangat cepat, yang tidak dapat diprediksi. Hal ini mendapat pengaruh juga dengan berlakunya peraturan terbaru terkait jabatan akademik dosen sehingga usulan untuk kenaikan jabatan ke lektor kepala menjadi lebih berkurang.



Grafik 10. Hasil Penilaian Angka Kredit Di Kopertis Wilayah III.

Sampai dengan akhir tahun 2017, prosentase dosen dengan jabatan lektor kepala dapat dicapai sebesar 6,23%. Tercapainya prosentase dosen dengan jabatan lektor kepala dikarenakan adanya dukungan kegiatan:

1. Penilaian Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen; dan
2. Evaluasi Beban Kerja Dosen.

12. Jumlah Publikasi Nasional.

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatang Fungsional dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, diharapkan mendukung program pencapaian tujuan pendidikan dan mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain dalam produktivitas karya ilmiah. Oleh karena itu, jenis karya ilmiah sebagai syarat utama menduduki jenjang jabatan akademik tertentu dapat berbeda satu dengan yang lainnya. Selain itu, untuk karya ilmiah tertentu yang digunakan dalam kenaikan jabatan akademik diberlakukan batas paling tinggi yang diakui. Penentuan batas paling tinggi yang diakui disesuaikan dengan kriteria jabatan akademik.

Salah satu indikator kualitas dan keberhasilan dalam proses pengawasan, pengendalian dan pembinaan dosen adalah dengan melihat seberapa banyak jumlah publikasi nasional. Pada tahun 2017 ditargetkan jumlah publikasi nasional sebanyak 189 judul, sedangkan pada akhir tahun 2016 sudah terdapat 3.000 judul dari target 4.500 judul publikasi nasional pada akhir tahun 2019.

Permasalahan utama yang dihadapi Kopertis Wilayah III dalam upaya peningkatan jumlah publikasi nasional dikarenakan kurangnya kegiatan monitoring dan evaluasi serta pendampingan kepada dosen untuk mempublikasikan hasil penelitiannya pada tingkat nasional. Selain itu pendataan yang dilakukan terhadap hasil penelitian yang dipublikasikan pada tingkat nasional belum berjalan secara optimal sehingga banyak hasil publikasi nasional tidak terdata.

Sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah publikasi nasional dapat dicapai sebanyak 1.607 judul. Tercapainya jumlah publikasi nasional dikarenakan adanya dukungan kegiatan:

1. Bimbingan Teknis Penulisan Artikel Jurnal Internasional; dan
2. Bimbingan Teknis Metodologi Penelitian Dosen.

13. Rasio Dosen Tetap Terhadap Jumlah Mahasiswa.

Pendidikan tinggi di Indonesia merupakan subsistem pendidikan Nasional yang mencakup program diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu unsur dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah dosen. Dosen merupakan tenaga akademik yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.

Salah satu indikator kualitas dan keberhasilan dalam proses pengawasan, pengendalian dan pembinaan PTS adalah dengan melihat seberapa besar rasio dosen tetap terhadap jumlah mahasiswa. Pada tahun 2017 ditargetkan rasio dosen tetap terhadap jumlah mahasiswa sebesar 1:32,78, sedangkan pada akhir tahun 2016 baru terdapat 1:32, dari target 1:30 rasio dosen tetap terhadap jumlah mahasiswa pada akhir tahun 2019.

Permasalahan utama yang dihadapi banyak program studi yang tidak memenuhi persyaratan rasio dosen tetap terhadap mahasiswa. Hal ini disebabkan berbagai hal, salah satu diantaranya adalah sulitnya mendapatkan dosen yang bersedia secara penuh waktu untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.

Sampai dengan akhir tahun 2017, rasio dosen tetap terhadap jumlah mahasiswa dapat dicapai sebesar 1:30,51. Tercapainya rasio dosen tetap terhadap jumlah mahasiswa dikarenakan adanya dukungan kegiatan:

1. Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA); dan
2. Monitoring dan Evaluasi PTS;

14. Jumlah Penelitian yang Dimanfaatkan Masyarakat.

Dalam merekonstruksi sistem ekonomi, sosial, budaya dan politik, pendidikan tinggi harus terus berupaya menciptakan terobosan baru untuk menunjang pembangunan nasional secara menyeluruh. Peningkatan daya saing bangsa bermakna bahwa iptek

dan pendidikan tinggi dapat memberikan kontribusi dalam penguatan perekonomian yang ditunjukkan oleh keunggulan produk teknologi hasil penelitian dan pengembangan yang dihasilkan oleh industri/perusahaan, untuk dapat memenuhi harapan masyarakat agar perguruan tinggi juga bisa berperan sebagai agent of economic development, maka perguruan tinggi dituntut untuk dapat menghasilkan inovasi yang dapat memberikan manfaat ekonomis bagi masyarakat secara luas.

Salah satu indikator kualitas dan keberhasilan dalam proses pengawasan, pengendalian dan pembinaan dosen adalah dengan melihat seberapa jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat. Pada tahun 2017 ditargetkan jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat sebanyak 28 judul, sedangkan pada akhir tahun 2016 sudah terdapat 550 judul dari target 700 judul penelitian yang dimanfaatkan masyarakat pada akhir tahun 2019.

Permasalahan utama yang dihadapi Kopertis Wilayah III dalam upaya peningkatan jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat dikarenakan kurangnya kegiatan monitoring dan evaluasi serta pendampingan kepada dosen untuk mengembangkan penelitian agar dimanfaatkan masyarakat. Selain itu pendataan yang dilakukan terhadap jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat belum berjalan secara optimal sehingga banyak hasil penelitian yang dimanfaatkan masyarakat tidak terdata.

Sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat dapat dicapai sebanyak 607 judul. Tercapainya jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat dikarenakan adanya dukungan kegiatan:

1. Seminar Hasil Penelitian Dosen; dan
2. Bimbingan Teknis Metodologi Penelitian Dosen.

Sasaran Strategis 3:

Terlaksananya kerjasama PTS dengan pihak internasional dalam bidang tridharma perguruan tinggi

Dalam menghasilkan lulusan sebagai tenaga terdidik dan terampil yang mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam negeri dan mampu bersaing dengan tenaga terampil asing. Pengembangan *softskills*, kewirausahaan, dan daya juang untuk bersaing perlu senantiasa difasilitasi oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi memerlukan bantuan *role model* pemberdayaan mahasiswa dan dosen dalam peningkatan pengembangan diri. Di sisi lain daya kompetitif mahasiswa juga sangat diperlukan untuk ditingkatkan melalui berbagai kompetisi, agar terbiasa menghadapi persaingan di kehidupan bermasyarakat kelak.

Sasaran strategis ini capaiannya diukur oleh 3 (tiga) indikator kinerja, dengan rincian tingkat pencapaian sebagai berikut:

Tabel 9. Capaian Sasaran Strategis 3 Tahun 2017.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2015-2019	Capaian 2016	Tahun 2017		
				Target	Realisasi	%
Terlaksananya kerjasama PTS dengan pihak internasional dalam bidang tridharma perguruan tinggi	Jumlah Mahasiswa Yang Berwirausaha	3.500	2.000	66	174	263,64
	Prosentase Lulusan Bersertifikat Kompetensi dan Profesi	75	50	60	70,5	117,5
	Jumlah Prototipe R&D	20	15	20	307	1.535

Berdasarkan data kinerja diatas dapat dijelaskan bahwa dari 3 (tiga) indikator kinerja yang ada untuk mengukur sasaran, seluruh indikator kinerja telah mencapai target bahkan melebihi.

Untuk rincian analisis capaian setiap indikator kinerja diuraikan sebagai berikut:

1. Jumlah Mahasiswa Yang Berwirausaha.

Peningkatan daya saing bangsa salah satunya dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). SDM berdaya saing mampu mengubah setiap tantangan menjadi peluang. Inilah salah satu *soft skill* yang juga harus dibangun bagi lulusan perguruan tinggi di Indonesia selain kemampuan penalaran dan kreatifitas. Kemampuan mengubah tantangan menjadi peluang bernilai ekonomis ini dapat dilakukan melalui pembangunan karakter kewirausahaan. Pembangunan karakter ini tidak hanya membangun pola pikir dan motivasi berwirausaha namun juga membekali mahasiswa dengan ketrampilan dasar berwirausaha. Sehingga setiap lulusan perguruan tinggi di Indonesia dapat menentukan pilihan menjadi tenaga profesional sesuai kompetensinya atau berwirausaha sesuai dengan kejeliannya membaca peluang.

Salah satu indikator kualitas dan keberhasilan dalam tercapainya mahasiswa yang berwirausaha adalah dengan melihat jumlah mahasiswa yang berwirausaha. Pada tahun 2017 ditargetkan mahasiswa yang berwirausaha sebanyak 66 mahasiswa, sedangkan pada akhir tahun 2016 sudah terdapat 2.000 mahasiswa dari target 3.500 mahasiswa yang sudah berwirausaha pada akhir tahun 2019.

Permasalahan utama yang dihadapi Kopertis Wilayah III dalam upaya peningkatan jumlah mahasiswa yang berwirausaha dikarenakan kurangnya kegiatan monitoring dan evaluasi serta pendampingan kepada mahasiswa yang berwirausaha. Selain itu pendataan yang dilakukan terhadap mahasiswa yang berwirausaha belum berjalan secara optimal sehingga banyak mahasiswa yang telah berwirausaha tidak terdata.

Sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah mahasiswa yang berwirausaha 174 mahasiswa. Tercapainya indikator jumlah mahasiswa yang berwirausaha dikarenakan adanya dukungan kegiatan:

1. Bimbingan Teknis Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa;
2. Pelatihan Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM);
3. Hibah Program Mahasiswa Wirausaha (PMW); dan
4. Hibah Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM).

2. Prosentase Lulusan Bersertifikat Kompetensi dan Profesi.

Sertifikat kompetensi adalah dokumen pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi diluar program studinya. Mengukur lulusan perguruan tinggi yang lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan sertifikat kompetensi yang terstandar, lulusan perguruan tinggi Indonesia memiliki daya saing untuk masuk dalam pasar kerja nasional, regional, ataupun internasional.

Salah satu indikator kualitas dan keberhasilan dalam tercapainya lulusan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan profesi adalah dengan melihat seberapa persen lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi. Pada tahun 2017 ditargetkan prosentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi adalah sebesar 60%, sedangkan pada akhir tahun 2016 baru terdapat 50% dari target 75% lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi pada akhir tahun 2019.

Keberhasilan Kopertis Wilayah III dalam upaya peningkatan lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi dan profesi dengan mengadakan sosialisasi kepada PTS tentang Peraturan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi, serta melakukan Monitoring dan Evaluasi.



Gambar 9. Sosialisasi Peraturan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.

Sampai dengan akhir tahun 2017, prosentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi dapat dicapai sebanyak 70,5%. Tercapainya indikator prosentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi dikarenakan adanya dukungan kegiatan:

1. Sosialisasi Peraturan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
 2. Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA); dan
 3. Monitoring dan Evaluasi PTS.
3. Jumlah Prototipe R&D.

Keterlibatan industri menjadi kunci pendorong dalam rangka mempercepat proses inovasi, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku R & D di sektor industri, dan meningkatkan produk-produk hasil industri dalam negeri, serta memberikan peluang penciptaan lapangan pekerjaan pada sektor industri tersebut dengan adanya proyek-proyek R&D. Selain itu, industri membutuhkan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan perguruan tinggi yang terkait. Industri membutuhkan dukungan dari pemerintah untuk mengembangkan produk-produk teknologi industri nasional yang bukan hanya sebatas output namun sudah masuk

pada kategori prototipe laik industri yang masuk pada fase pra-komersial (telah teruji) dan benar-benar siap untuk *mass production* (komersial).

Salah satu indikator kualitas dan keberhasilan dalam tercapainya prototipe R&D adalah dengan melihat jumlah prototipe R&D. Pada tahun 2017 ditargetkan terdapat prototipe R&D sebanyak 20 (duapuluh) buah, sedangkan pada akhir tahun 2016 sudah terdapat 15 (limabelas) buah dari target 20 (duapuluh) prototipe R&D pada akhir tahun 2019.

Permasalahan utama yang dihadapi Kopertis Wilayah III dalam upaya peningkatan jumlah prototipe R&D dikarenakan kurangnya kegiatan monitoring dan evaluasi serta pendampingan kepada dosen dan mahasiswa dalam membuat prototipe R&D. Selain itu pendataan yang dilakukan terhadap dosen dan mahasiswa yang telah membuat prototipe R&D belum berjalan secara optimal sehingga banyak prototipe R&D yang tidak terdata.

Sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah prototipe R&D sebanyak 307 buah. Tercapainya indikator jumlah prototipe R&D dikarenakan adanya dukungan kegiatan:

1. Bimbingan Teknis Metodologi Penelitian Dosen;
2. Seminar Hasil Penelitian Dosen;
3. Hibah Penelitian; dan
4. Hibah Pengabdian Pada Masyarakat.

B. Realisasi Anggaran

Pagu Kopertis Wilayah III dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2017 yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2017 sebesar Rp. 315.385.531.000. Pagu tersebut digunakan untuk pembiayaan 2 (dua) program yang ada pada Kopertis Wilayah III yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; dan
2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti.

Dari pagu anggaran Rp. 315.385.531.000 yang di anggarkan untuk mencapai target yang ditetapkan berhasil terserap sebesar Rp. 312.003.275.394 sehingga presentase daya serap anggaran Kopertis Wilayah III sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2107 adalah sebesar 98,93%.

Tabel 10. Realisasi Anggaran Tahun 2017 Berdasarkan Program.

No.	Program	PAGU	Realisasi	Sisa	%
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	307.917.839.000	305.104.308.835	2.813.530.165	99,09
2.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti	7.467.692.000	6.898.966.559	568.725.441	92,38
Jumlah		315.385.531.000	312.003.275.394	3.382.255.606	98,93

Dari sisi jenis belanja realisasi Kopertis Wilayah III tahun 2017 untuk belanja pegawai presentase realisasi anggaran sebesar 99,18%, belanja barang presentase realisasi anggaran sebesar 95,91%, dan belanja modal presentase realisasi anggaran sebesar 85,19%.

Tabel 11. Realisasi Anggaran Tahun 2017 Berdasarkan Jenis Belanja.

No.	Belanja	PAGU	Realisasi	Sisa	%
1.	Pegawai	301.667.839.000	299.192.862.944	2.474.976.056	99,18
2.	Barang	10.491.959.000	10.062.472.541	429.486.459	95,91
3.	Modal	3.225.733.000	2.747.939.909	477.793.091	85,19
Jumlah		315.385.531.000	312.003.275.394	3.382.255.606	98,93

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Kopertis Wilayah III ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Kopertis Wilayah III dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2015-2019. Penyusunan LAKIN Kopertis Wilayah III mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kopertis Wilayah III telah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam situasi dan kondisi perkembangan dunia pendidikan tinggi, terutama pada perguruan tinggi swasta, tugas pengawasan, pengendalian dan pembinaan PTS dirasakan semakin berat dan penuh tantangan, namun demikian, Kopertis Wilayah III telah berhasil mengatasi tantangan tersebut, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Hal ini tampak pada pencapaian sasaran strategis tahun 2017 sudah sesuai target yang ditetapkan, walaupun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target yang ditentukan.

Mengacu pada Pasal 57 Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyebutkan: (1) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi merupakan satuan kerja Pemerintah di wilayah yang berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi; (2) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Menteri; Menteri menetapkan tugas dan fungsi lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan; (4) Menteri secara berkala mengevaluasi kinerja lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kemudian Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Kopertis) bertanggungjawab kepada Menteri, dan pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Masa transisi ini menjadi penting bagi Kopertis untuk mempersiapkan diri menuju Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, terutama dalam konteks perubahan pola pikir, penyediaan sumber daya, dan pemahaman tugas dan fungsi baru.

Memperhatikan hal tersebut diatas maka Kopertis Wilayah III menetapkan sasaran strategis sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan dalam kurun waktu 2015-2019. Sasaran strategis tersebut adalah:

1. Meningkatnya sistem dan kualitas/kuantitas sumber daya;
2. Meningkatnya relevansi, kuantitas dan kualitas pendidikan tinggi; dan
3. Terlaksananya kerjasama PTS dengan pihak internasional dalam bidang tridharma perguruan tinggi.

Untuk melihat secara lebih konkrit ketercapaian sasaran strategis tersebut perlu ditetapkan ukuran indikator kinerja tersebut secara kuantitatif. Dalam rancangan 5 (lima) tahun ke depan, indikator kinerja sasaran strategis diukur (1) indeks reformasi birokrasi Kopertis ditargetkan mencapai nilai 90 (sembilan puluh), (2) jumlah PTS masuk 100 TOP Nasional sebanyak 22 PTS dan (3) jumlah PTS melakukan kerjasama dengan masyarakat internasional dalam bidang tridharma perguruan tinggi sebanyak 180.

Secara umum keseluruhan capaian indikator kinerja sasaran strategis tersebut di atas, telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi Kopertis Wilayah III khususnya dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi umumnya, untuk selalu meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa-masa mendatang.

Akhirnya dengan disusunnya LAKIN ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Kopertis Wilayah III, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal LAKIN ini harus dijadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja Kopertis Wilayah III dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang akan ditetapkan dengan menyesuaikan perkembangan tuntutan pemangku kepentingan, sehingga Kopertis Wilayah III dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang lebih profesional.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ir. Illah Sailah, MS.
Jabatan : Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak.
Jabatan : Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Desember 2016

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak.

Dr. Ir. Illah Sailah, MS.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH III

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya sistem dan kualitas/kuantitas sumberdaya	Jumlah Layanan Berbasis Elektronik	17 Layanan
	Prosentase Daya Serap Keuangan	95 %
	Nilai Sasaran Kinerja Pegawai	90 %
Meningkatnya relevansi, kuantitas dan kualitas Pendidikan tinggi	Jumlah Perguruan Tinggi Berakreditasi A (Unggul)	9 PTS
	Prosentase Dosen Berkualifikasi S3	11,4 %
	Jumlah Publikasi Internasional	25 Judul
	Prosentase Dosen Bersertifikat Pendidik	35 %
	Prosentase Prodi Terakreditasi Minimal B	56 %
	Jumlah Mahasiswa Berprestasi	2.611 Mahasiswa
	Jumlah Perguruan Tinggi Yang Masuk Top 100 Nasional	17 PTS
	Prosentase Mahasiswa Penerima Beasiswa	1,54 %
	Rasio Dosen Tetap Terhadap Jumlah Dosen	0,83
	Prosentase Dosen Dengan Jabatan Jabatan Guru Besar	1,4 %
	Prosentase Dosen Dengan Jabatan Lektor Kepala	6,95 %
	Jumlah Publikasi Nasional	189 Judul
	Rasio Dosen Tetap Terhadap Jumlah Mahasiswa	1 : 32,78
	Jumlah Penelitian yang Dimanfaatkan Masyarakat	28 Judul
Terlaksananya kerjasama PTS dengan pihak internasional dalam bidang tridharma perguruan tinggi	Jumlah Mahasiswa yang Berwira Usaha	66 Mahasiswa
	Prosentasi Lulusan Bersertifikat Kompetensi dan Profesi	60 %
	Jumlah Prototipe R&D	20 Buah

Kegiatan **Anggaran**

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Rp. 313.207.425.000
2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti	Rp. 10.100.000.000
Total	Rp. 323.307.425.000

Jakarta, 30 Desember 2016

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi
Swasta Wilayah III

Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak.

Dr. Ir. Illah Sailah, MS.

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH III
TAHUN ANGGARAN 2017**

Kami telah mereviu laporan kinerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III untuk tahun anggaran 2017 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Februari 2018
a.n. Ketua SPI
Sekretaris

Yan Medya Putri
NIP 197101162005012001

CHECK LIST REVIU

No	Pernyataan	Check List
I	<p>Format</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja telah menyajikan data penting Unit Kerja 2. Laporan Kinerja telah menyajikan informasi target kinerja 3. Laporan Kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai 4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan 	
II	<p>Mekanisme penyusunan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja disusun oleh unit organisasi yang memiliki tugas dan fungsi menyusun Laporan Kinerja 2. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah didukung dengan data yang memadai 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit organisasi ke unit penyusun Laporan Kinerja 4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap Unit Kerja 5. Data/informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah diyakini keandalannya 6. Analisis dalam Laporan Kinerja telah diketahui oleh unit organisasi terkait 7. Laporan Kinerja bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya 	
III	<p>Substansi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah selaras dengan rencana stategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja 5. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja utama 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat 8. Indikator Kinerja telah cukup mengukur tujuan/sasaran 9. Jika butir 8 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 10. Indikator Kinerja telah SMART 	

Jakarta, Februari 2018
 a.n. Ketua SPI
 Sekretaris

Yan Medya Putri
 NIP 197101162005012001

Nomor : /K3/TU/2018

Februari 2018

Lampiran : 1 (satu) bundel

Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2017

Yth. Sekretaris Jenderal
u.p. Kepala Biro Perencanaan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Jalan Jenderal Sudirman Pintu I, Senayan
Jakarta 10270

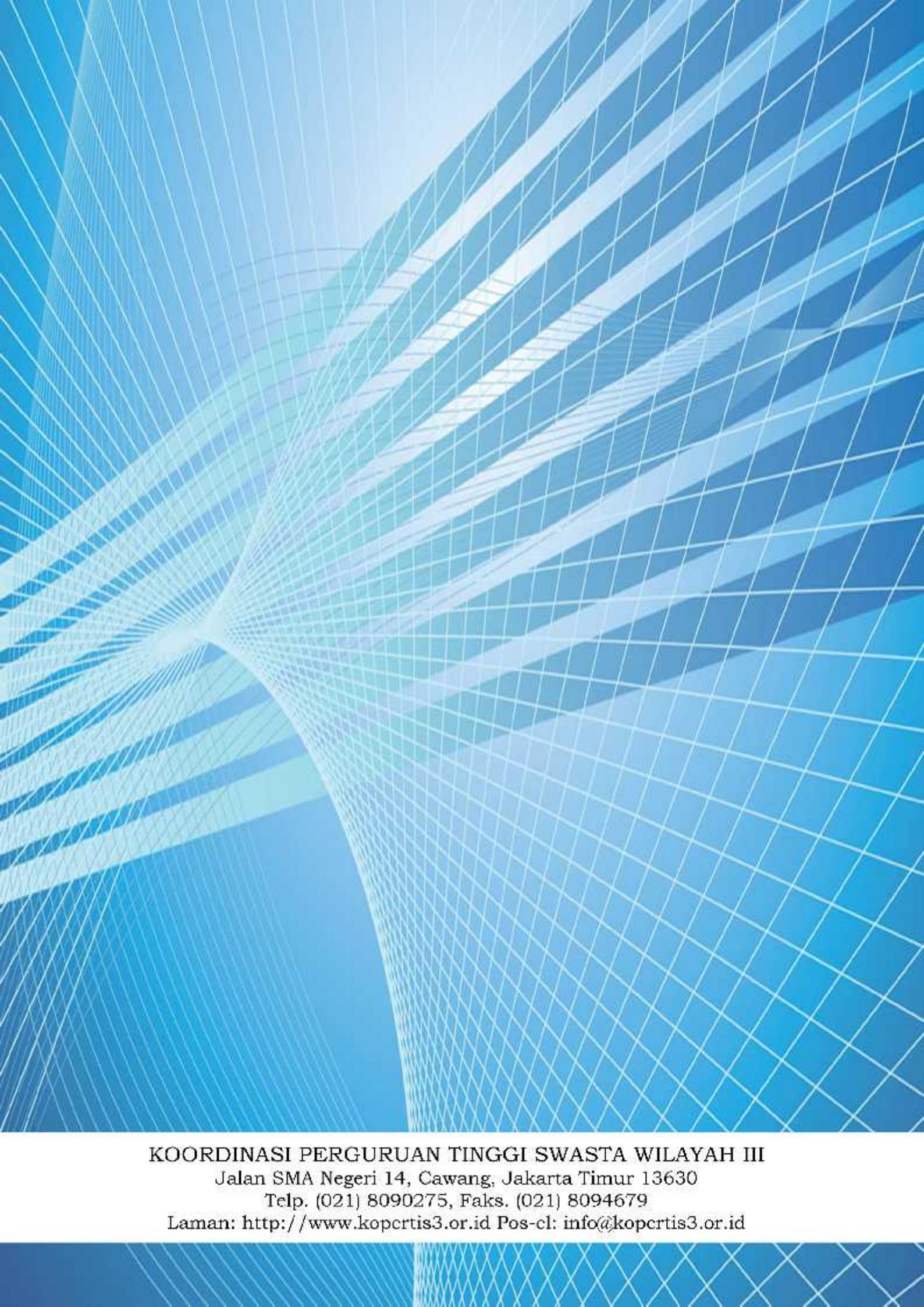
Menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 5482/A.A1/PR/2017 tanggal 21 Desember 2017 perihal Perjanjian Kinerja tahun 2018 dan Laporan Kinerja Tahun 2017, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Tahun 2017.

Perlu kami informasikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2017 mengacu pada DIPA Tahun Anggaran 2017 Nomor SP DIPA- 042.01.2.400894/2017 dan Nomor SP DIPA- 042.03.2.401228/2017.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Koordinator

Illah Sailah
NIP 195805211982112001



KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH III
Jalan SMA Negeri 14, Cawang, Jakarta Timur 13630
Telp. (021) 8090275, Faks. (021) 8094679
Laman: <http://www.kopertis3.or.id> Pos-cl: info@kopertis3.or.id